



Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan laporan akhir Dewan Perwakilan Daerah dengan tepat waktu. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Badan Pengawas Pemilu merupakan salah satu lembaga vital yang senantiasa berusaha memastikan terjaganya hak pilih warga negara serta keberlangsungan pemilihan yang jujur, bersih, dan adil serta berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsi pencegahan dan pengawasan tentunya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan ketentuan hukum di segala jenjang, pemahaman tentang keilmuan hukum bagi seorang *watchman* sebagai ujung tombak lembaga pengawasan harus sejalan dengan produk atau *statment* hukum yang di tampilkan kepada publik sebagai bentuk nyata output dari kinerja yang di lakukan baik sebelum, selama, atau pasca tahapan.

Bentuk kinerja yang dilakukan divisi hukum yang berpedoman pada ketentuan hukum atau peraturan Bawaslu yakni penyusunan laporan akhir yang berisi hasil Pengawasan tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Laporan akhir ini merupakan bentuk pertanggungjawaban divisi hukum Bawaslu Bojonegoro kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil kinerja dan kesesuaian dengan tupoksi divisi hukum.

Kami menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, diharapkan saran dan kritik yang membangun agar kami menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga laporan akhir ini menambah wawasan dan memberi manfaat bagi pembaca.

Bojonegoro, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan.....	6
C. Landasan Hukum.....	7
D. Sistematika laporan.....	8

BAB II Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2.1 Laporan Hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD.....	9
2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal.....	10
2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	11
2.1.1.1 Pencegahan & Pengawasan.....	13
2.1.1.2 Tabulasi Permasalahan.....	18
2.1.1.3 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	19
2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu.....	19
2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	20
2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan.....	21
2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan.....	26
2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	27
2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua.....	27
2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	28
2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan.....	29
2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan.....	34
2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	35
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD.....	35
2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu.....	35
2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	37
2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan.....	39
2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan.....	43
2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	44
2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua.....	44
2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	45

2.2.2.2	Pencegahan & Pengawasan.....	47
2.2.2.3	Tabulasi Permasalahan.....	49
2.2.2.4	Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	50

BAB III Penutup

3.1	Kesimpulan.....	51
3.2	Rekomendasi.....	51

Lampiran-Lampiran

4.1	Daftar Tabel.....	52
4.2	Daftar Grafik.....	53
4.3.	Daftar Gambar.....	54
4.4	Surat Edaran.....	55
4.5	Intruksi pengawasan.....	57
4.6	Surat imbauan.....	59
4.7	Surat Keputusan Timfas DPD Kabupaten Bojonegoro.....	67
4.8	Berita Acara Verifikasi Faktual Kesatu.....	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan suatu pemerintahan negara. Kedua konsep tersebut akan berkaitan satu dengan lainnya. Pada dasarnya demokrasi memberikan landasan serta mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan hak dan persamaan derajat manusia, di sisi yang lain negara hukum memberikan ketentuan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, kepala pemerintahan serta seluruh pejabat politiknya harus dipilih oleh rakyat (warga negara) dalam suatu Pemilihan umum (Pemilu). Pemilu menurut Undang-Undang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, yaitu jabatan Presiden/Eksekutif, Wakil rakyat/Legislatif di berbagai tingkat Pemerintahan sampai Kepala Desa. Dilaksanakannya Pemilu adalah agar terwujudnya kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tata cara pelaksanaan Pemilu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan pada Bawaslu untuk menjalankan proses penyelenggaraan pemilu lebih baik lagi. Perbaikan dalam regulasi Pemilu guna memperbaiki standar penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan

yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tertinggi dalam lembaga legislatif. Adapun, anggota DPD biasa disebut senator. Visi DPD yakni menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI, sedangkan misi DPD yakni memperkuat kewenangan DPD sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU, memperkuat DPD sebagai parlemen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerah ditingkat nasional, mengoptimalkan hubungan kelembagaan DPD dengan lembaga Negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya serta meningkatkan hubungan kelembagaan DPD dengan parlemen dalam negeri dan luar negeri.

Berdasarkan Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, fungsi DPD yakni pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR, ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten Bojonegoro berjalan lancar, dimulai dari tahapan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, verifikasi faktual kesatu, verifikasi administrasi perbaikan kedua hingga verifikasi faktual kedua. Tahapan verifikasi administrasi dimulai dari tanggal 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023, tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dimulai tanggal 23 Januari 2023 hingga 1 Februari 2023, tahapan verifikasi faktual kesatu dimulai tanggal 6 Februari 2023 hingga 26 Februari 2023, tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dimulai tanggal 12 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023, serta tahapan verifikasi faktual kedua dimulai tanggal 26 Maret 2023 hingga 8 April 2023. Seluruh tahapan selama pencalonan DPD di Kabupaten Bojonegoro tidak ada kendala dikarenakan setiap tahapan selalu diantisipasi dengan dibuatnya imbauan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk meminimalisir adanya pelanggaran selama tahapan berlangsung.

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memperhatikan ketentuan diantaranya yakni melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 162/PM.00.02/K.JI-04/12/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1.	Moch. Zaenuri, ST	Ketua Bawaslu	Kordinator
2	Dian Widodo, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pengarah
3	Lilik Mustafidah, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pengarah
4	Mochammad Alfianto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Mujiono, SH	Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Eva Rindias Yulia Devi	Staf Pelaksana Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Ketua
7	Ahmad Fikri Faisal	Staf Pelaksana Divisi PPH	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8	Dawam, SE	BPP	Sekretaris
V	Anggota		
9	Shinta Bunga Lestari	Staf Pelaksana Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Fibri Endi Ulfa Dira Kumala	Staf Pelaksana Divisi OSDM	Anggota
11	Siti Windaryati	Staf Pelaksana Divisi PP	Anggota
12	M. Muhajirin	Staf Pelaksana Divisi PP	Anggota
13	Siti Kiswaton Khasanah	Staf Pelaksana Divisi PPH	Anggota
14	Siti Mukayah	Staf Pelaksana Divisi OSDM	Anggota

Tabel 4.1.1 Tabel susunan tim fasilitasi Pencalonan DPD Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas :
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas :
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Tujuan Laporan

Tujuan laporan ini dibuat untuk menjelaskan hasil pengawasan tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan laporan akhir ini, nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan di tahun selanjutnya terkait evaluasi dari pengawasan yang telah dilakukan. Laporan ini sebagai realisasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dari mulai tahapan verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual kedua. Laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah menjalankan seluruh kegiatan pengawasan pencalonan DPD sesuai regulasi dan peraturan Bawaslu.

Adapun beberapa manfaat laporan akhir pengawasan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah, diantaranya :

- Bagi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
 - Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun 2023;
 - Sebagai bahan pertimbangan perencanaan program kegiatan tahun 2024.
- Bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 - Sebagai bahan masukan dari kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
 - Sebagai bahan masukan dari kabupaten/kota untuk menyiapkan program Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2024;
 - Sebagai landasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan masukan peningkatan kinerja kelembagaan pada Bawaslu RI.
- Bagi Bawaslu RI
 - Sebagai bahan masukan dari kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi kegiatan tahun 2023;
 - Sebagai bahan masukan dari kabupaten/kota untuk menyiapkan program tahun 2024;

- Sebagai bahan masukan dari kabupaten/kota dalam penyusunan produk hukum penyelenggaraan pemilu/pemilihan selanjutnya;
- Sebagai salah satu indikator pengambilan kebijakan jangka menengah dan panjang terkait kelembagaan pengawas pemilu.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 20 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. SE Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah
6. SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi factual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2023
7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan diawali dengan pembahasan terkait kerawanan dan rencana pengawasan dimulai dari tahapan verifikasi administrasi awal, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, verifikasi administrasi perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu dan verifikasi faktual kedua. Dalam setiap tahapan diuraikan dengan detail terkait pemetaan titik rawan serta strategi pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan membedah strategi pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk mengantisipasi adanya laporan/temuan. Bentuk pencegahan yang dilakukan salah satunya dengan mengirim surat imbauan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro disetiap tahapan dengan harapan laporan/temuan dapat diminimalisir dengan prinsip kehati-hatian. Kegiatan pengawasan dilakukan Bawaslu baik secara melekat di kantor KPU dengan membuat jadwal pengawasan secara rutin dan bergilir juga dengan melakukan pengawasan melalui Silon Bawaslu oleh Admin yang telah ditunjuk. Dengan adanya bentuk pengawasan ini diharapkan transparansi data dapat saling dipantau bersama.

Pembahasan terkait temuan juga diuraikan dalam laporan ini mengingat terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dan jajarannya selama melakukan proses pengawasan. Seluruh temuan disampaikan oleh Bawaslu pada saat menghadiri rapat koordinasi di kantor KPU bersama dengan PPK. Baik temuan pada saat melakukan pengawasan melekat maupun pada saat pengawasan di Silon diuraikan dengan jelas pada laporan ini. Selanjutnya terkait rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU telah disampaikan. Beberapa rekomendasi telah dijabarkan dalam pembahasan ini terutama terkait komunikasi dan koordinasi yang harus terus dijaga agar antar penyelenggara pemilu dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. Tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan juga menjadi catatan di internal KPU dan dengan sigap akan melaksanakan segala bentuk saran yang diberikan Bawaslu demi tercapainya demokrasi yang utuh.

BAB II
Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

Tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai 12 Januari 2023. Bakal Calon Anggota DPD di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 19 Bacalon dengan rincian nama Yakni 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda, Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti, Aa. Ahmad Nawardi, Abdul Qadir Amir Hartono, Adilla Azis, Agus Rahardjo, Ayub Khan, Bambang Hariyanto, Catur Rudi Utanto, Doddy Dwi Nugroho, Emilia Contessa, Erlyta Dwi A Siregar, Evi Zainal Abidin, Kondang Kusumaning Ayu, Kunjung Wahyudi, Lia Istifhama, Mohammad Trijanto, Narto Sk Dentopuro, Dan Siti Rafika Hardhiansari. Jumlah dukungan yang perlu diverifikasi di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2506 Dukungan dari 19 Bacalon tersebut. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pengawasan melekat di KPU Kabupaten Bojonegoro selama verifikasi administrasi berlangsung. Rincian nama bakal calon beserta jumlah dukungannya yakni:

No	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin	Jumlah Dukungan
1	'Aisyah Aleena Maheswari Novinda	P	353
2	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	P	429
3	Aa. Ahmad Nawardi	L	6
4	Abdul Qadir Amir Hartono	L	7
5	Adilla Azis	P	4
6	Agus Rahardjo	L	2
7	Ayub Khan	L	23
8	Bambang Hariyanto	L	6
9	Catur Rudi Utanto	L	10
10	Doddy Dwi Nugroho	L	306
11	Emilia Contessa	P	39
12	Erlyta Dwi A Siregar	P	415
13	Evi Zainal Abidin	P	14

14	Kondang Kusumaning Ayu	L	24
15	Kunjung Wahyudi	L	200
16	Lia Istifhama	P	193
17	Mohammad Trijanto	L	100
18	Narto Sk Dentopuro	L	35
19	Siti Rafika Hardhiansari	P	340
Jumlah			2506

4..1.2 Tabel dukungan Verifikasi Administrasi Awal



4.2.1 Grafik perbandingan jenis kelamin bakal calon perseorangan

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menuangkan hasil pengawasan dalam alat kerja pengawasan sesuai ketentuan Surat Edaran No 37 Tahun 2022 dan Surat Edaran No 3 Tahun 2023. Dalam AKP SE No 37 Tahun 2022 memuat terkait daftar dukungan yang di bubuhi tanda tangan, dukungan disertai KTP-el, jumlah dukungan, jumlah sebaran, umur pemberi dukungan, pemberi dukungan yang berstatus pekerjaan yang dilarang, ganda dukungan, dukungan yang masuk DPT, kesesuaian alamat pendukung, tindak lanjut umur/pekerjaan, tindak lanjut pendukung potensi ganda, dan Berita Acara Rekapitulasi. Sedangkan dalam AKP SE NO 3 Tahun 2023 memuat terkait hasil verifikasi setiap bacalon, status pekerjaan, ketidaksesuaian alamat, dugaan pelanggaran, serta dukungan BMS.

Hasil pengawasan juga dituangkan dalam Formulir Model A mulai tanggal 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023.

2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Kerawanan & rencana pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam memetakan potensi masalah dalam tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yakni :

KABUPATEN : BOJONEGORO			
NO	KENDALA	MASUKAN	KEGIATAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1	Jumlah dukungan awal di Silon berbeda dengan jumlah pada saat di rekap by name	Segera diperbaiki oleh bakal calon pada saat perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan	Berkoordinasi dengan KPU Bojonegoro terkait jumlah yang tidak sinkron
2	Terdapat dukungan di kelurahan yang belum diupload Silon	Segera diperbaiki oleh bakal calon pada saat perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan	Berkoordinasi dengan KPU dan timses bakal calon untuk melengkapi kekurangan dukungan tersebut
3	Dukungan ganda internal	Segera diperbaiki oleh bakal calon pada saat perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan	Berkoodinasi dengan KPU dan timses bakal calon untuk segera menghapus dukungan ganda tersebut
4	Terdapat dukungan dari kabupaten lain yang diupload di dukungan kabupaten bojonegoro	Segera diperbaiki oleh bakal calon pada saat perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan	Berkoodinasi dengan KPU dan timses bakal calon untuk mengganti dukungan dan lebih teliti dalam mengupload data dukungan di Silon
5	Dalam F1 tidak dicantumkan nama pendukung atau nama kelurahan/kecamatan	Segera diperbaiki oleh bakal calon pada saat perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan	Berkoordinasi dengan KPU dan timses bakal calon untuk meneliti dan memeriksa setiap berkas yang di upload Silon

4.1.3 Tabel Kerawanan Verifikasi Administrasi Awal

Rencana pengawasan yang disusun Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni dimulai dengan meminta akses Silon Kepada KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai sarana pengawasan secara online dengan memantau progres tahapan dan perkembangan hasil

verifikasi yang dilakukan KPU. Selain pengawasan di Silon, pengawasan secara melekat di Kantor KPU juga dilakukan mengingat terdapat 3 Admin/Verifikator di KPU Kabupaten Bojonegoro. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terus menjalin komunikasi yang baik dengan KPU dengan terus memantau dari awal tahapan yakni penyerahan dukungan minimal pemilih yakni tahapan persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih yang dilakukan tanggal 6 Desember 2022 hingga 29 Desember 2022 dan penyerahan dukungan minimal pemilih tanggal 16 Desember 2022 hingga 29 Desember 2022. Selain memetakan kendala, masukan serta kegiatan yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bojonegoro dalam tahapan Verifikasi Administrasi Awal, Bawaslu Juga membagi jadwal pengawasan melekat di kantor KPU Kabupaten Bojonegoro yang rinciannya:

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	NAMA
1	Ju'mat/ 30 Desember 2022	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
			Siti Windaryati
2	Sabtu/31 Desember 2022	09.00 - 16.00	Mochammad Alfianto
			Muhajirin
			Siti Kiswatun Khasanah
3	Minggu/01 Januari 2023	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Ahmad Fikri Faisal
			Siti Mukayah
4	Senin/02 Januari 2023	09.00 - 16.00	Mujiono
			Eva Rindias Yulia Devi
			Shinta Bunga Lestari
5	Selasa/03 Januari 2023	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Siti Kiswatun Khasanah
			Siti Mukayah
6	Rabu/04 Januari 2023	09.00 - 16.00	Moch. Zaenuri
			Ahmad Fikri Faisal
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
7	Kamis/05 Januari 2022	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Siti Windaryati
			M. Muhajirin
8	Jum'at/06 Januari 2023	09.00 - 16.00	Mochammad Alfianto
			Shinta Bunga Lestari
			Siti Kiswatun Khasanah
9	Sabtu/07 Januari 2023	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Eva Rindias Yulia Devi

			Ahmad Fikri Faisal
10	Minggu/08 Januari 2023	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
			M. Muhajirin
11	Senin/09 Januari 2022	09.00 - 16.00	Moch. Zaenuri
			Siti Mukayah
			Siti Windaryati
12	Selasa/10 Januari 2022	09.00 - 16.00	Mochammad Alfianto
			Siti Kiswatun Khasanah
			Eva Rindias Yulia Devi
13	Rabu/11 Januari 2022	09.00 - 16.00	Mujiono
			Ahmad Fikri Faisal
			Siti Mukayah
14	Kamis/12 Januari 2022	09.00 - 16.00	Moch. Zaenuri
			Siti Windaryati
			Shinta Bunga Lestari

4.1.4 Tabel Jadwal Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal

2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

Strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 014/PM.00.02/K.JI-04/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 Kepada KPU Kabupaten Bojonegoro yang berisi Melaksanakan Verifikasi Administrasi tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Mandiri, b) Jujur, c) Adil, d) Berkepastian Hukum, e) Tertib, f) Terbuka, g) Proporsional, h) Profesional, i) Akuntabel; j) Efektif, k) Efisien dan l) Aksesibel. Hasil pengawasan melekat di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu kabupaten Bojonegoro tidak mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh dikarenakan Banyaknya admin Silon dan keterbatasan personil pengawas. Banyaknya admin silon juga dipengaruhi dengan Silon yang terkendala pada saat awal tahapan dan jumlah dukungan perlu diverifikasi jumlahnya banyak. Selain itu verifikasi juga dilakukan secara fleksibel bahkan hingga larut malam sehingga Bawaslu tidak bisa mengimbangi baik dalam jumlah perosnil maupun keterbatasan waktu pengawasan. Langkah pengawasan yang dilakukan Bawaslu yakni pengawasan melekat di Kantor KPU yang dituangkan dalam Form A, dengan rincian :

No	Nomor dan Tanggal Form A	Hasil Pengawasan
1	180/LHP/PM.00.02/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022	Proses verifikasi administasi pada hari pertama sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU Bojonegoro belum dilakukan. Jumlah pendaftar pada rentan tanggal 16 hingga 29 Desember 2022 sebanyak 31 bakal calon DPD namun hanya 21 orang yang dokumen dukungan minimalnya lengkap dan dapat di terima oleh KPU Provinsi Jawa Timur. KPU Bojonegoro masih menunggu instruksi karena masih dilakukan analisis data oleh KPU Provinsi.
2	181/LHP/PM.00.02/XII/2022 Tanggal 31 Desember 2022	Proses verifikasi administasi pada hari kedua sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU Bojonegoro belum dilakukan. KPU Bojonegoro masih menunggu instruksi karena masih dilakukan analisis data oleh KPU Provinsi.
3	001/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 1 Januari 2023	Proses verifikasi administasi hingga saat ini masih belum efektif dilakukan. KPU Bojonegoro masih menunggu instruksi dari KPU Provinsi Jawa Timur dikarenakan beberapa menu dalam dalam SILON belum bisa sepenuhnya diakses oleh verifikasi sehingga proses verifikasi administrasi masih belum dilaksanakan oleh Kabupaten.
4	002/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023	Proses verifikasi administasi belum dilakukan oleh KPU Bojonegoro dikarenakan beberapa menu dalam sistem belum lengkap sehingga masih menunggu instruksi dari Kasubbag Teknis terkait jadwal verifikasi administrasi. Proses verifikasi akan segera dilakukan apabila seluruh menu dalam SILON dapat diakses oleh verifikasi KPU.
5	003/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 3 Januari 2023	KPU Kabupaten Bojonegoro sudah mulai melakukan proses verifikasi administasi dalam aplikasi SILON DPD. Aplikasi dinyatakan lancar. Untuk

		petugas verifikator baru 3 orang. Jumlah yang diverifikasi yaitu 2.500 dukungan.
6	004/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 4 Januari 2023	Proses verifikasi administrasi hari ini tidak ada/belum dilakukan, dikarenakan KPU Kabupaten Bojonegoro sedang melakukan pelantikan PPK di Dewarna Hotel Bojonegoro.
7	005/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023	Proses verifikasi administrasi terpantau lancar meskipun hari sebelumnya aplikasi SILON terganggu karna jaringan gateway, dibarengi dengan pelaksanaan perekrutan PPS tim verifikasi dibagi menjadi beberapa pekerjaan, dan di hari tersebut tim KPU berhasil memverifikasi 150 anggota dengan rincian sebagai mana berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Calon DPD atas nama AA Ahmad Mawasrdi (6 anggota) - Calon DPD atas nama Agus Raharjo (2 anggota) - Calon DPD atas nama Aisyah Aleena Maheswari (142 anggota)
8	006/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 6 Januari 2023	KPU Kabupaten Bojonegoro sudah mulai melakukan proses verifikasi administrasi dalam aplikasi SILON DPD. Aplikasi dinyatakan lancar dapat login. Tetapi terkadang menu pada Verifikasi tidak muncul. Jumlah total yang telah diverifikasi yaitu sebanyak 310 pendukung. Kemudian untuk calon yang telah 100% diverifikasi yaitu terdapat 4 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah.
9	007/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 7 Januari 2023	Proses verifikasi administrasi pada hari ini belum ada penambahan dikarenakan Silon masih maintenance. Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi sejumlah 314 sedangkan jumlah dukungan yang belum diverifikasi 2192.

		Progres verifikasi administrasi per tanggal 07 Januari 2023 adalah 12,53 %. Selain pengawasan ke kantor KPU Bojonegoro, Bawaslu juga melihat update data di Silon untuk mengecek progres verifikasi dukungan.
10	008/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 8 Januari 2023	Untuk verifikasi administrasi DPD hari ini ada kendala yaitu aplikasi sering <i>maintenance</i> , sehingga proses vermin hari ini juga terganggu. Sementara data yang di vermin sampai hari ini adalah 314.
11	09/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023	Pada hari tersebut tidak ada satupun anggota yang dapat terverifikasi dikarenakan menu pada aplikasi SILON tidak muncul, sehingga tidak dapat mengoprasikanya.
12	010/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023	Proses verifikasi administasi pada hari ini belum ada penambahan dikarenakan Silon masih masa perbaikan. Jumlah dukungan yang sudah diverifikasi awalnya sejumlah 314 sedangkan jumlah dukungan yang belum diverifikasi 2192. Namun per jam 15.30 WIB dukungan yang sudah diverifikasi di Silon tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi 0 dukungan yang sudah diverifikasi.
13	011/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023	Proses verifikasi administasi sudah dapat dilakukan di mulai tanggal 23 Januari 2023 di karenakan sebelumnya akses SILON mengalami kendala server yang tidak dapat di buka, sehingga mengakibatkan beberapa data yang sudah di verifikasi administrasi hilang (<i>Restart</i> ulang). Proses verifikasi sudah 45 persen selesai.
14	012/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023	Kabupaten Bojonegoro sudah mulai melakukan proses verifikasi administasi dalam aplikasi SILON DPD. Aplikasi dinyatakan lancar dapat login. Untuk calon yang telah 100% diverifikasi yaitu terdapat 15 bakal calon Dewan

		Perwakilan Daerah. Calon yang masih proses verifikasi terdapat 5 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah dengan Progres 40% pada pukul 15.00 WIB.
--	--	---

Tabel.4.1.5 Tabel hasil pengawasan verifikasi administrasi awal



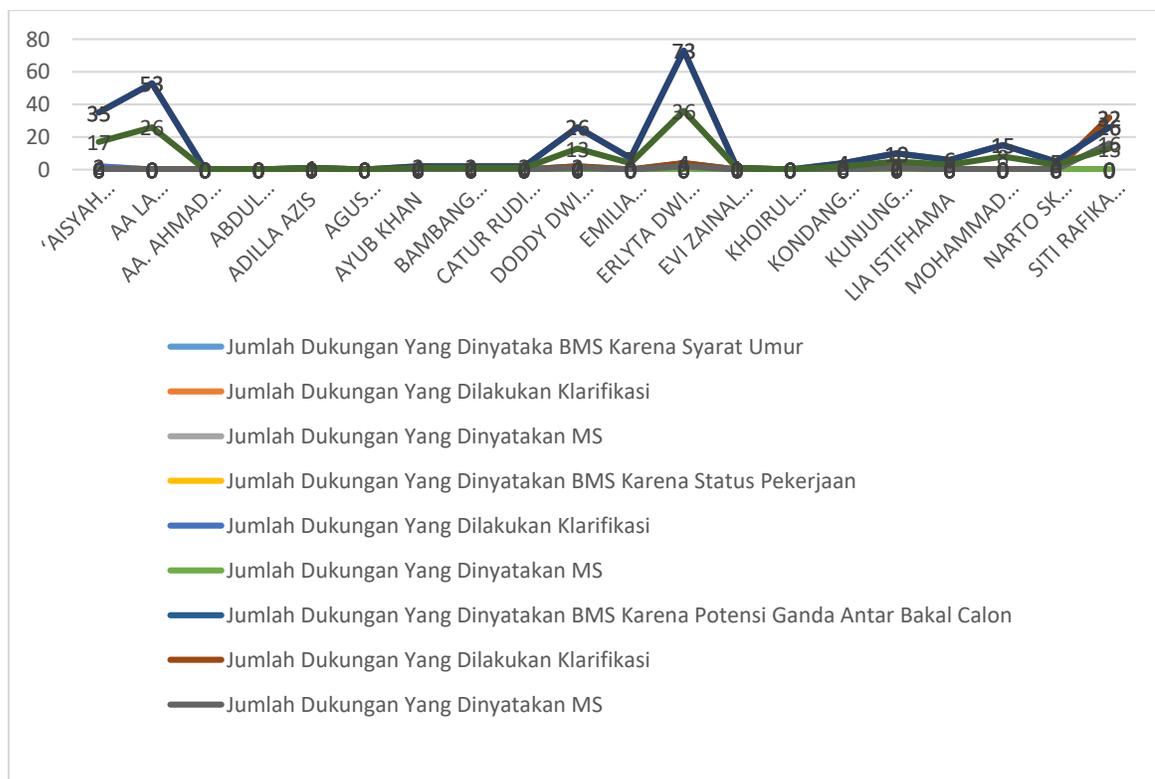
4.3.1 Gambar Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan melekat di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro secara bergantian. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Jadwal pengawasan di kantor KPU juga telah dijelaskan pada pembahasan rencana pengawasan dan hasil pengawasannya dituangkan dalam Form A.



Gambar 4.3.2 Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk AKP yang diberikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Salah satu AKP dalam tahapan Verifikasi Administrasi Awal yakni terkait dukungan Belum Memenuhi Syarat (BMS) masing-masing bakal calon dengan acuan terkait dukungan yang dinyatakan BMS karena umur, dukungan yang melakukan klarifikasi, dukungan yang dinyatakan MS, dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan, dan dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon yang grafiknya seperti dibawah ini.



4.2.2 Grafik Dukungan BMS Verifikasi Administrasi Awal

2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan

Selama tahapan verifikasi administrasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tidak memperoleh laporan maupun temuan karena setiap awal tahapan selalu diantisipasi dengan diberikannya imbauan dengan tujuan untuk meminimalisir baik laporan maupun temuan. Namun dari hasil verifikasi administrasi Bawaslu menemukan adanya pendukung bakal calon Aisyah Aleena Maheswari Novinda yang bernama Sri Sugiarti yang beralamat di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu dan Dewi Ika Purnamasari yang beralamat di Desa Wadang Kecamatan Ngasem keduanya berstatus pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Terkait ketidaksesuaian alamat dan dugaan pelanggaran di

Kabupaten Bojonegoro nihil. Jumlah dukungan potensi ganda identik dalam satu dukungan bakal calon DPD, jumlah dukungan potensi ganda dalam satu dukungan bakal calon DPD dan jumlah dukungan potensi ganda antar bakal calon DPD hasil dari pencermatan alat kerja pengawasan verifikasi administrasi masih ditemukan beberapa bakal calon yang dukungannya terdapat kegandaan.

2.1.1.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil pencermatan terhadap alat kerja pengawasan pada tahapan verifikasi administrasi memang ditemukan beberapa permasalahan seperti kegandaan dan status pekerjaan yang tidak diperbolehkan, namun mengikuti alur tahapan selanjutnya yakni perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu yakni pada tanggal 16 Januari 2023 hingga 22 Januari 2023 bacalon telah mengetahui adanya kegandaan dan status pekerjaan yang tidak diperbolehnya serta memperbaiki dukungan tersebut ditahap ini. Pada tahap verifikasi administrasi Silon masih sering *maintenance* sehingga progres setiap harinya tidak bisa dipastikan. Silon KPU maupun Bawaslu memang banyak kendala pada tahapan verifikasi ini sehingga pengawasan di silon juga tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pengawasan secara melekat telah dilaksanakan Bawaslu kabupaten Bojonegoro namun dikarenakan keterbatasan personil dengan jumlah verifikator dari KPU, pengawasan pun dilakukan semaksimal mungkin serta data pengawasan dikumpulkan dalam Form A. Keterbukaan dan akses Silon yang lancar sangat diperlukan guna mendukung proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu sehingga marwah demokrasi antar penyelenggara pemilu selalu terjaga.

2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

Perbaikan verifikasi administasi kesatu dimulai tanggal 23 Januari 2023 hingga 1 Februari 2023. Pada tahap ini jumlah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 16 Bacalon dengan total 978 dukungan dengan rincian nama bakal calon diantaranya 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda, Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti, Aa. Ahmad Nawardi, Abdul Qadir Amir Hartono, Adilla Azis, Ayub Khan, Catur Rudi Utanto, Doddy Dwi Nugroho, Emilia Contessa, Erlyta Dwi A Siregar, Kondang Kusumaning Ayu, Kunjung Wahyudi, Lia Istifhama, Mohammad Trijanto, Narto Sk Dentopuro, Dan Siti Rafika Hardhiansari. Pada tahapn ini Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan prosedur di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro serta pengawasan output di Silon, namun lebih banyak pengawasan dilakukan di Silon karena

progres verifikasi administrasi dapat dipantau secara bertahap dan terbuka. Pada tahap ini Silon sudah dapat diakses dengan lancar sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih maksimal.

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	P	311
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	P	64
3	AA. AHMAD NAWARDI	L	3
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	L	1
5	ADILLA AZIS	P	3
6	AYUB KHAN	L	2
7	CATUR RUDI UTANTO	L	19
8	DODDY DWI NUGROHO	L	74
9	EMILIA CONTESSA	P	16
10	ERLYTA DWI A SIREGAR	P	61
11	KONDANG KUSUMANING AYU	L	2
12	KUNJUNG WAHYUDI	L	76
13	LIA ISTIFHAMA	P	238
14	MOHAMMAD TRIJANTO	L	1
15	NARTO SK DENTOPURO	L	13
16	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	P	94
JUMLAH			978

4.1.6 Tabel sebaran dukungan tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

2.1.2.1 kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah mengantisipasi kerawanan di tahapan perbaikan verifikasi administrasi kesatu dengan terus membangun komunikasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro terkait permasalahan yang terjadi pada tahap verifikasi administrasi sehingga kerawanan yang mungkin terjadi sudah dibicarakan dan dicari solusi bersama. Kerawanan yang berpotensi terjadi yakni terkait kegandaan dan status pekerjaan dukungan telah ditindaklanjuti dan dihapus dari daftar dukungan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Rencana pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni dengan memaksimalkan pengawasan baik prosedur maupun output sehingga verifikasi yang dilakukan terhadap dukungan yang berjumlah 978 sesuai aturan. Untuk memantau progres verifikasi yang dilakukan oleh admin KPU, Bawaslu melalui Silon dapat memantau dengan lebih efektif dan efisien karena setiap dukungan yang diverifikasi dapat diketahui sehingga transparansi antar penyelenggara

pemilu berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro membuat jadwal pengawasan melekat dikantor KPU Kabupaten Bojonegoro dengan rincian:

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	NAMA
1	Senin/23 Januari 2023	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Siti Kiswatun Khasanah
			Siti Mukayah
2	Selasa/24 Januari 2023	09.00 - 16.00	Moch. Zaenuri
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
			Shinta Bunga Lestari
3	Rabu/25 Januari 2023	09.00 - 16.00	Mujiono
			Ahmad Fikri Faisal
			Siti Windaryati
4	Kamis/26 Januari 2023	09.00 - 16.00	Mochammad Alfianto
			Eva Rindias Yulia Devi
			Muhajirin
5	Jum'at/27 Januari 2023	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Siti Mukayah
			Siti Windaryati
6	Sabtu/28 Januari 2023	09.00 - 16.00	Moch. Zaenuri
			Ahmad Fikri Faisal
			Shinta Bunga Lestari
7	Minggu/29 Januari 2022	09.00 - 16.00	Mochammad Alfianto
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
			Eva Rindias Yulia Devi

8	Senin/30 Januari 2023	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Muhajirin
			Siti Windaryati
9	Selasa/31 Januari 2023	09.00 - 16.00	Mujiono
			Shinta Bunga Lestari
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
10	Rabu/01 Februari 2023	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Siti Kiswatun Khasanah
			Eva Rindias Yulia Devi

Tabel 4.1.7 Tabel Jadwal Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan

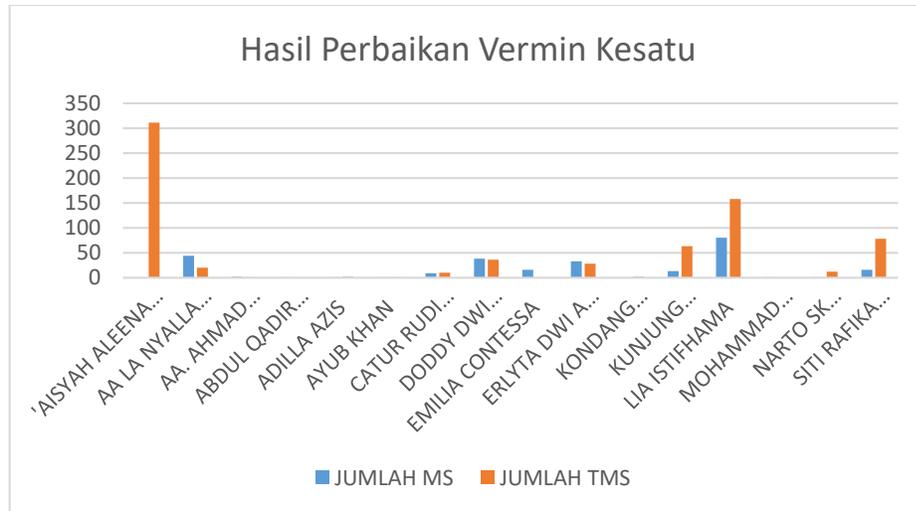
Pencegahan yang dilakukan selama tahapan perbaikan verifikasi administrasi kesatu yakni dengan memberikan imbauan secara lisan yakni dengan mengacu pada PKPU No 11 tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sering melakukan konsultasi atau komunikasi dua arah dengan KPU Kabupaten Bojonegoro untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran atau sengketa. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tidak jauh berbeda dengan tahapan Verifikasi Administrasi Awal yakni terkait proses pengawasan yang tidak bisa melekat sehingga pengawasan lebih banyak diarahkan di Silon Bawaslu. Selain itu, pada saat melakukan pengawasan melekat di KPU Kabupaten Bojonegoro tetap melakukan verifikasi dengan waktu yang tidak menentu dikarenakan silon yang beberapa kali mengalami kendala sistem. Hasil pengawasan dituangkan dalam Form A baik secara prosedur maupun output dengan sampling uraian pengawasan yakni :

No	Nomor Dan Tanggal Form A	Hasil Pengawasan
1	025/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 28 Januari 2023	Hasil dari pengawasan Verifikasi Perbaikan kesatu hari ini di Silon bahwa KPU Bojonegoro telah melakukan verifikasi : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah bakal calon 17 Calon Jumlah Dukungan Perlu

		<p>diverifikasi 978 Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dukungan belum diverifikasi 65 orang • Jumlah dukungan sudah diverifikasi 913 orang • Proses dukungan sudah diverifikasi 93,35%
2	026/LHP/PM.00.02/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023	<p>Hasil dari pengawasan Verifikasi Perbaikan kesatu hari ini bahwa KPU Bojonegoro telah melakukan verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bakal calon 17 Calon • Jumlah Dukungan Perlu diverifikasi 978 Orang <p>Bawaslu Bojonegoro pengawasan prosedur dengan sampling Jumlah Dukungan saat ini diverifikasi 64 Orang, dukungan atas nama bakal calon Kunjung Wahyudi sebanyak 20 dukungan</p>

4.1.8 Tabel hasil pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

Hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu dijelaskan dalam grafik dengan jumlah dukungan Menuhi Syarat (MS) dan dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari masing-masing bakal calon dengan rincian :



4.2.3 Grafik hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu



4.3.3 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan melekat dikantor KPU Kabupaten Bojonegoro tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu secara bergilir. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Komisioner beserta staf untuk mengetahui perkembangan proses verifikasi yang dilakukan oleh admin KPU.



Gambar 4.3.4 Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

Selain melakukan pengawasan melakat di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga melakukan pengawasan output melalui Silon Bawaslu. perkembangan proses verifikasi juga dapat dipantau secara bertahap sehingga memudahkan proses pengawasan dan transparansi data dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah.

Daerah Pemilihan	Usia < 17 Tahun		Usia >= 17 Tahun	Pekerjaan Dilarang	Potensi Ganda		Identik Dalam 1 Bakal Calon YBS	Tidak Ganda	Total Dukungan
	Belum Kawin	Sudah/Pernah Kawin			Lebih 1 Bakal Calon	Dalam 1 Bakal Calon YBS			
KAB. BOJONEGORO	0	0	977	1	2	15	14	960	977

No.	Nama Bakal Calon	Usia < 17 Tahun Belum Kawin	Usia < 17 Tahun Sudah/Pernah Kawin	Usia >= 17 Tahun	Pekerjaan Dilarang	Potensi Ganda Lebih 1 Bakal Calon	Potensi Ganda Dalam 1 Bakal Calon YBS	Identik Dalam 1 Bakal Calon YBS	Tidak Ganda	Total Dukungan
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	0	0	311	0	0	5	5	306	311
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALUATI	0	0	64	0	0	0	0	64	64
3	AA. AHMAD NAWARDI	0	0	3	0	0	0	0	3	3

Gambar 4.3.5 Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tidak menemukan adanya temuan maupun laporan terkait tahapan perbaikan verifikasi administrasi kesatu, namun terdapat aduan masyarakat yang menyatakan keberatan atas penggunaan nama dan data pribadi dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah dalam sistem informasi pencalonan (SILON) dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Lahir	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan
1	Fathia Rosyida	18 Agustus 1990	3522105808****	Perempuan	RT17/RW06 Baureno, Bojonegoro	Swasta

4.1.9 Tabel Laporan Masyarakat tahapan Perbaikan Vermin Kesatu

Hasil dari perbaikan verifikasi administrasi kesatu diperoleh banyaknya dukungan yang tidak memenuhi syarat dari bakal calon anggota DPD dikarenakan data pendukung tidak tercantum dalam daftar pemilih, namun juga masih banyak dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. KPU Kabupaten Bojonegoro juga membuka helpdesk bagi masyarakat yang ingin konsultasi atau mencabut dukungan terhadap salah satu bakal calon DPD dengan pelayanan dari jam 08.00 sampai 16.00 WIB. Dengan adanya

helpdesk tersebut tentu meminimalisir adanya dugaan pelanggaran atau temuan karena tersedianya layanan informasi yang terbuka.

2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi dari tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua yakni dengan meningkatkan pelayanan dan akses informasi yang terbuka yakni dengan memastikan Silon dapat diakses dengan lancar serta helpdesk yang selalu memberikan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan selama tahapan berlangsung. Pengawasan prosedur yang di lakukan Bawaslu kabupaten Bojonegoro dalam tahapan ini berjalan lancar serta komunikasi yang harus selalu ditingkatkan antar sesama penyelenggara. KPU Kabupaten Bojonegoro juga memberikan Bawaslu akses yang cukup baik untuk melakukan pengawasan. Selain itu pencermatan yang diperlukan oleh Bawaslu, KPU memberikan ruang untuk saling terbuka dan sinkronisasi data selalu dilakukan guna menunjang keterpenuhan kebutuhan informasi.

2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

Tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua dilaksanakan tanggal 12 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023. Jumlah bakal calon yang harus diverifikasi sebanyak 5 bacalon dengan jumlah dukungan keseluruhan sebanyak 1456 dukungan. Nama bakal calon tersebut diantaranya 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda, Doddy Dwi Nugroho, Lia Istifhama, Narto Sk Dentopuro, Dan Siti Rafika Hardhiansari. Pada tahapan ini pengawasan tetap dilakukan baik secara prosedur maupun output. Terhadap pengawasan prosedur Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyiapkan jadwal pengawasan segera bergilir dan untuk pengawasan output Bawaslu kabupaten Bojonegoro hanya memberikan akses kepada staf yang membidangi atau admin silon. Seperti pada tahapan verifikasi administrasi dan perbaikan verifikasi administrasi kesatu, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro hingga pada tahapan ini terus menjalin komunikasi yang intens dengan KPU Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, pengawasan juga dilakukan semaksimal mungkin mengingat adanya peningkatan jumlah dukungan yang harus diverifikasi.

NO	NAMA BACALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	P	15
2	DODDY DWI NUGROHO	L	711
3	LIA ISTIFHAMA	P	2
4	NARTO SK DENTOPURO	L	650

5	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	P	78
JUMLAH			1456

4.1.10 Tabel sebaran bacalon anggota DPD Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

7.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Komunikasi dan hubungan yang intens antar penyelenggara pemilu menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Dengan prinsip itu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan KPU Kabupaten Bojonegoro mampu membaca kerawanan pada masing-masing tahapan sehingga ditahapan inipun tentu tidak jauh berbeda dengan tahapan verifikasi administrasi sebelumnya sehingga kerawanan dapat dicegah sedini mungkin. Kerawanan yang mungkin terjadi yakni terkait kegandaan dikarenakan adanya peningkatan jumlah dukungan yang diserahkan bakal calon anggota DPD. Rencana pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga masih fokus pada pengawasan prosedur maupun pengawasan output jadi selain melakukan pengawasan melekat di kantor KPU, pada hari yang sama admin silon juga terus memantau perkembangan proses verifikasi secara online. Hasil pengawasan baik prosedur maupun output dituangkan dalam Form A dan hasil tersebut selalu ditinjau oleh PJ Timfas untuk sama-sama memantau perkembangan tahapan. Berikut jadwal piket Bawaslu Kabupaten Bojonegoro di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro:

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	NAMA
1	Minggu/12 Maret 2023	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
			Siti Windaryati
2	Senin/13 Maret 2023	09.00 - 16.00	Mochammad Alfianto
			Muhajirin
			Siti Kiswatun Khasanah
3	Selasa/14 Maret 2023	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Ahmad Fikri Faisal
			Siti Mukayah
4	Rabu/15 Maret 2023	09.00 - 16.00	Mujiono
			Eva Rindias Yulia Devi

			Shinta Bunga Lestari
5	Kamis/16 Maret 2023	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Siti Kiswatun Khasanah
			Siti Mukayah
6	Jumat/17 Maret 2023	09.00 - 16.00	Moch. Zaenuri
			Ahmad Fikri Faisal
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
7	Sabtu/18 Maret 2022	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Siti Windaryati
			M. Muhajirin
8	Minggu/19 Maret 2023	09.00 - 16.00	Mochammad Alfianto
			Shinta Bunga Lestari
			Siti Kiswatun Khasanah
9	Senin/20 Maret 2023	09.00 - 16.00	Dian Widodo
			Eva Rindias Yulia Devi
			Ahmad Fikri Faisal
10	Selasa/21 Maret 2023	09.00 - 16.00	Lilik Mustafidah
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
			M. Muhajirin

4.1.11 Tabel Jadwal pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

7.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan

Bentuk pencegahan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada tahapan perbaikan verifikasi administasi kedua yakni dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 068/PM.00.02/K.JI-04/03/2023 Tanggal 10 Maret 2023 yang berisi Melaksanakan Verifikasi Administrasi kedua tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dasar hukum diatas dan Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Mandiri, b) Jujur, c) Adil, d) Berkepastian Hukum, e) Tertib, f) Terbuka, g) Proporsional, h) Profesional, i)

Akuntabel; j) Efektif, k) Efisien dan l) Aksesibel. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua yakni Verifikasi dilakukan admin KPU dan pada tahap ini Silon KPU sudah mudah untuk diakses dan jarang mengalami kendala. Sama seperti pengawasan ditahapan verifikasi sebelumnya, Bawaslu terus berusaha melakukan pengawasan melekat secara maksimal. Setiap bakal calon dan rekap verifikasi setiap harinya dilakukan upload dan laporan data ke Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Bojonegoro dituangkan dalam Form A dengan rincian :

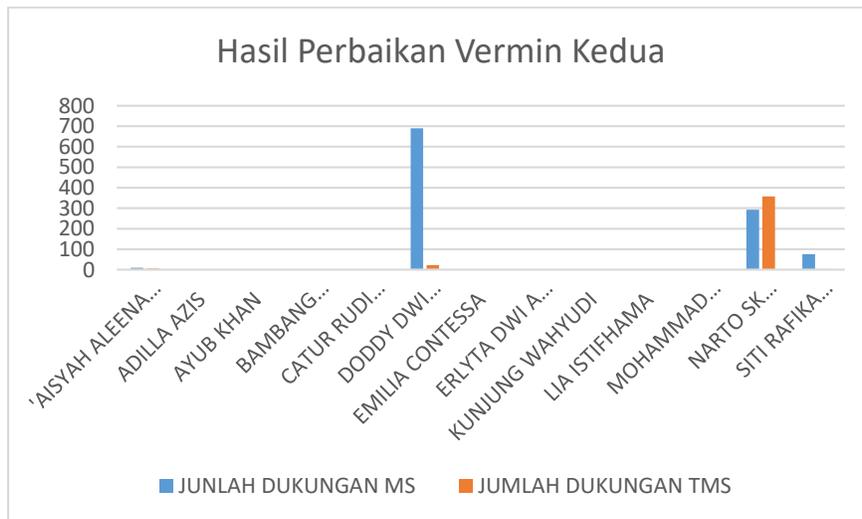
No	Nomor Dan Tanggal Form A	Hasil Pengawasan
1	037/LHP/PM.00.02/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023	<p>Hasil dari pengawasan Verifikasi Perbaikan kesatu hari ini bahwa KPU Bojonegoro telah melakukan verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bakal calon 14 Calon • Jumlah Dukungan Perlu diverifikasi 1456 Orang • Jumlah dukungan yang sudah di verifikasi oleh KPU Bojonegoro per jam 14.00 WIB sebanyak 203 dukungan • Bakal calon melakukan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua hanya 5 bakal calon, diantaranya 'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA, DODDY DWI NUGROHO, LIA ISTIFHAMA, NARTO SK DENTOPURO dan SITI RAFIKA HARDHIANSARI
2	038/LHP/PM.00.02/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023	<p>Hasil dari pengawasan Verifikasi Perbaikan kesatu hari ini bahwa KPU Bojonegoro telah melakukan verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menu verifikasi perbaikan kedua baru muncul hari ini sekitar pukul 13.30 WIB • Jumlah bakal calon 14 Calon • Jumlah Dukungan Perlu diverifikasi 1456 Orang • Jumlah dukungan yang sudah di verifikasi oleh KPU Bojonegoro per jam 14.30 WIB sebanyak 228 dukungan • Bakal calon melakukan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua hanya 5 bakal calon, diantaranya 'AISYAH ALEENA

		MAHESWARI NOVINDA, DODDY DWI NUGROHO, LIA ISTIFHAMA, NARTO SK DENTOPURO dan SITI RAFIKA HARDHIANSARI
3	039/LHP/PM.00.02/III/2023 Tanggal 18 Maret 2023	<p>Hasil dari pengawasan Verifikasi Perbaikan kesatu hari ini bahwa KPU Bojonegoro telah melakukan verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampilan jumlah hasil verifikasi dukungan yang dilakukan oleh KPU Bojonegoro yang sebelumnya ada di SILON sekarang sudah hilang dan hanya menampilkan daerah pemilihan jawa timur dan jumlah bakal calon saja • Lampiran model F1 pernyataan dukungan masih ada dan bisa di download • Untuk mengetahui jumlah dukungan yang sudah diverifikasi harus dilakukan pengawasan prosedur di KPU Bojonegoro
4	041/LHP/PM.00.02/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023	<p>Hasil dari pengawasan Verifikasi Perbaikan kesatu hari ini bahwa KPU Bojonegoro telah melakukan verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi administrasi perbaikan kedua pencalonan DPD telah selesai dilakukan oleh KPU Bojonegoro • Bakal calon 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda menyerahkan 15 dukungan, dimana 9 dukungan dinyatakan MS dan 6 dukungan dinyatakan TMS • Bakal calon Doddy Dwi Nugroho menyerahkan 711 dukungan, dimana 689 dukungan dinyatakan MS dan 22 dukungan dinyatakan TMS • Bakal calon Lia Istifhama menyerahkan 2 dukungan, dimana 1 dukungan dinyatakan MS dan 1 dukungan dinyatakan TMS • Bakal calon Narto SK Dentopuro menyerahkan 650 dukungan, dimana 293 dukungan dinyatakan MS, 357 dinyatakan TMS • Bakal calon Siti Rafika Hardhiansari menyerahkan 78 dukungan, dimana 75 dukungan dinyatakan MS dan 3 dukungan

dinyatakan TMS

4.1.12 Tabel Hasil pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

Pada tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua telah dituangkan dalam AKP dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dalam grafik dibawah dijelaskan terkait jumlah dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dimasing-masing bakal calon.

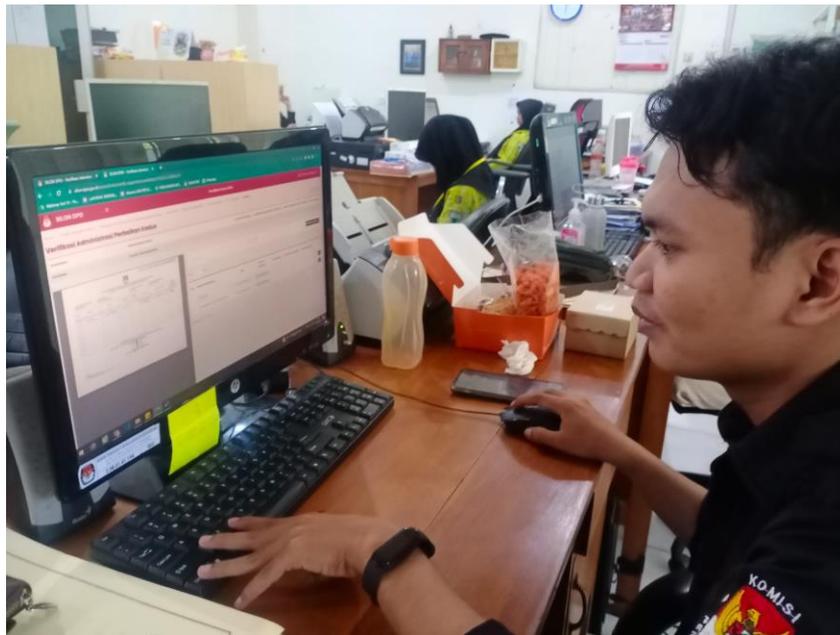


4.2.4 Grafik Hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua



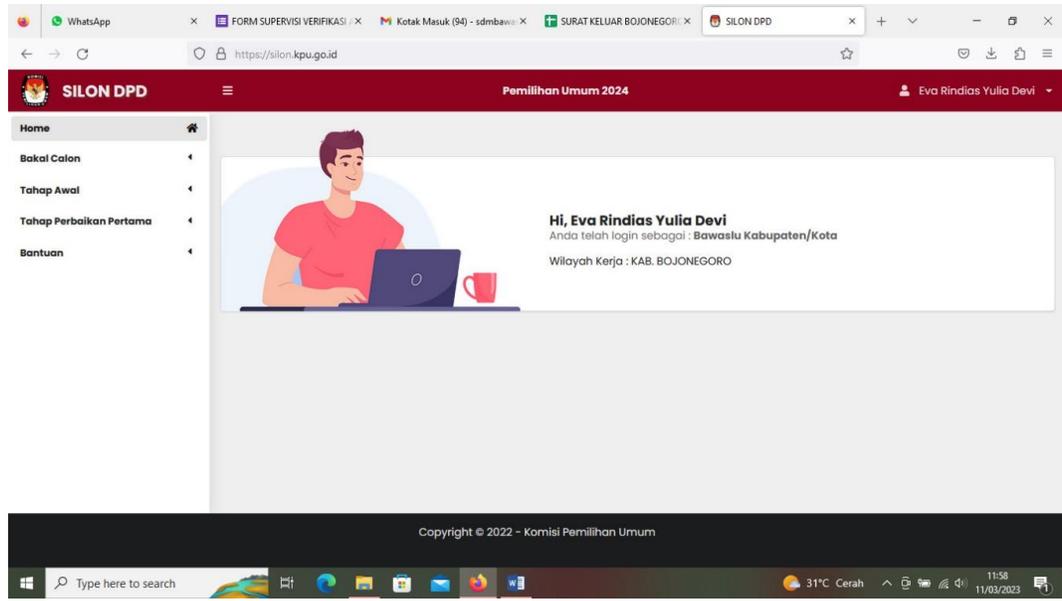
4.3.6 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

Bawaslu kabupaten Bojonegoro secara bergantian melakukan pengawasan melekat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan mendampingi langsung admin silon pada saat melakukan verifikasi serta menanyakan terkait apabila terdapat kendala atau masalah pada saat proses verifikasi dilakukan.



4.3.7 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

Proses pengawasan juga dilakukan Bawaslu kabupaten Bojonegoro melalui Silon. Setiap hari Bawaslu selalu mengupdate perkembangan di Silon dan memantau hasil verifikasi serta menuangkannya dalam Form A output. Proses pengawasan di Silon hanya dilakukan oleh dua orang staf yang diberikan tanggung jawab untuk memantau dan melaporkan hasil pengawasannya kepada penanggung jawab tim fasilitasi pencalonan Anggota DPD.



4.3.8 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

7.1.3.3 Tabulasi Permasalahan

Temuan pada tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua tidak ada, hal ini dapat terjadi karena telah dilakukan antisipasi terhadap kerawanan tahapan. Selain itu, pencegahan juga selalu dilakukan sejak awal untuk meminimalisir temuan maupun laporan. Namun jika ditinjau dari hasil verifikasi administrasi ditemukan adanya kegandaan pada satu bakal calon, hal ini memang sudah diketahui sejak awal dikarenakan adanya peningkatan jumlah dukungan dari beberapa bakal calon anggota DPD. Total jumlah dukungan yang di verifikasi pada perbaikan verifikasi administrasi kesatu sebanyak 978 dan pada perbaikan verifikasi administrasi kedua jumlahnya menjadi 1067 sehingga potensi ganda sangat mungkin terjadi. Sebaran dukungan bakal calon anggota DPD di Kabupaten Bojonegoro juga beragam dan tersebar hampir diseluruh Kecamatan. Silon juga terpantau lancar dan mudah diakses sehingga pencermatan menjadi jauh lebih efektif. Dari hasil verifikasi juga dapat diketahui bahwa dukungan yang tidak memenuhi syarat dikarenakan kegandaan sehingga harus segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dengan mengapus salah satu dukungan yang berpotensi ganda tersebut.

7.1.3.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni untuk selalu meningkatkan komunikasi baik antara Bawaslu, KPU dan LO bacaleg Anggota DPD. Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan, kegandaan dukungan harus segera diselesaikan oleh KPU sebagai bentuk persiapan menghadapi verifikasi faktual. Kelengkapan berkas pendukung lain juga harus dipastikan kebenarannya sehingga dukungan yang diupload telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahapan verifikasi administrasi berlangsung terkait perubahan atau penambahan dukungan harus selalu dicek secara berkala dari data awal hingga pada tahapan ini. Terutama terkait upload F1 di beberapa Kecamatan yang belum diupload di Silon Bawaslu. Hal ini menjadi catatan khusus bagi Bawaslu karena menghambat proses pengawasan yang dilakukan secara online. F1 yang ditulis tangan juga menjadi catatan Bawaslu karena tulisan tersebut beberapa tidak bisa terbaca dengan jelas. Silon menjadi salah satu sarana pengawasan Bawaslu sehingga perlu ditingkatkan fungsi dan efektifitasnya.

7.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

Tahapan verifikasi faktual kesatu dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari sampai 26 Februari 2023. KPU Kabupaten Bojonegoro mengirim surat undangan dengan nomor: 157/PL.01.1/3522/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang bimbingan teknis verifikasi faktual kesatu dukungan pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 bersama PPK Se-Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu KPU Kabupaten Bojonegoro mengirim surat dengan nomor 159/PL.01.1/3522/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan perihal jadwal kegiatan verifikasi faktual kesatu dukungan pemilih bakal calon anggota DPD. Verifikasi faktual kesatu sesuai dengan surat dari KPU Kabupaten Bojonegoro dimulai tanggal 10 sampai 20 Februari 2023 dengan sampling 22 Kecamatan dan total sampling dukungan sebanyak 276 orang. Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengirim surat dengan nomor 037/PM.00.02/K.JI-04/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bojonegoro dengan menugaskan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas untuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis pengawasan verifikasi faktual kesatu dukungan pemilih bakal calon anggota DPD pada Pemilu tahun 2024.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH YANG DIVERIFIKASI FAKTUAL
	BALEN	17
	BAURENO	29
	BOJONEGORO	36
	DANDER	4
	GONDANG	8
	KALITIDU	5
	KANOR	4
	KAPAS	9
	KASIMAN	2
	KEDEWAN	1
	KEDUNGADEM	41
	KEPOHBARU	41
	NGASEM	5
	NGRAHO	3
	PADANGAN	27
	PURWOSARI	5
	SUGIHWARAS	7
	SUKOSEWU	4
	SUMBEREJO	19
	TAMBAKREJO	2
	TEMAYANG	1
	TRUCUK	6
	JUMLAH	276

4.1.13 Tabel sebaran dukungan bakal calon anggota DPD tahapan Verifikasi Faktual Kesatu

Pada tanggal 14 Februari 2023 KPU Kabupaten Bojonegoro mengirim kembali sampling dukungan sejumlah 1065 tersebar di 28 Kecamatan di kabupaten Bojonegoro sehingga Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan sigap berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk segera meminta jadwal verifikasi faktual ke PPK/PPS di wilayah masing-masing. Bawaslu juga menginstruksikan ke Panwaslu Kecamatan untuk segera memberikan Bimbingan Teknis kepada PKD terkait pengisian Alat Kerja Pengawasan selama proses verifikasi faktual dilakukan oleh PPS. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya terkait status kehadiran dalam verifikasi faktual yang dijabarkan

menjadi beberapa pilihan, diantaranya dapat ditemui, dapat ditemui dengan panggilan video, mengirimkan rekaman video atau tidak dapat ditemui. Hasil dari proses verifikasi faktual yakni status pekerjaan tidak memenuhi syarat, telah meninggal dunia, menyatakan mendukung bakal calon, menyatakan tidak mendukung bakal calon atau alasan lain. Beberapa indikasi atau kelengkapan identitas yang perlu dikonfirmasi langsung pada saat proses verifikasi faktual yakni Nomor Induk Kependudukan, alamat lengkap, pekerjaan dan status perkawinan yang terdapat dalam Kartu Tanda Kependudukan pendukung tersebut.

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	P	194
2	AA. AHMAD NAWARDI	L	5
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	L	7
4	ADILLA AZIS	P	3
5	AGUS RAHARDJO	L	2
6	AYUB KHAN	L	14
7	BAMBANG HARIYANTO	L	6
8	CATUR RUDI UTANTO	L	9
9	DODDY DWI NUGROHO	L	163
10	EMILIA CONTESSA	P	35
11	ERLYTA DWI A SIREGAR	P	189
12	EVI ZAINAL ABIDIN	P	13
13	KONDANG KUSUMANING AYU	L	21
14	KUNJUNG WAHYUDI	L	100
15	LIA ISTIFHAMA	P	88
16	MOHAMMAD TRIJANTO	L	43
17	NARTO SK DENTOPURO	L	21
18	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	P	152
JUMLAH			1065

4.1.14 Tabel Sebaran dukungan bakal calon yang di Verifikasi Faktual Kesatu susulan

2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Kerawanan pada tahapan verifikasi faktual kesatu yakni terkait jumlah dukungan yang verifikasi faktual ditiap kecamatan berbeda sehingga kecamatan yang mendapat sampling dukungan harus bekerja ekstra serta memberikan bimbingan teknis kepada PKD untuk melakukan pengawasan selama tahapan verifikasi faktual kesatu dilakukan. Selain itu kerawanan eksternal yang dihadapi yakni dukungan yang sulit ditemui dikarenakan pada

saat melakukan verifikasi faktual pada jam kerja sehingga untuk bertemu dukungan tersebut cukup memberi tantangan bagi jajaran KPU maupun Bawaslu, koordinasi terkait jadwal verifikasi faktual juga menjadi tantangan untuk PKD dikarenakan baik PPK maupun PPS terkadang melakukan verifikasi tidak berpacu pada jadwal namun lebih pada kondisional PPS sehingga koordinasi dan komunikasi yang intens menjadi kunci pengawasan. Kerawanan yang lain juga berkaitan dengan beririsannya tahapan verifikasi faktual kesatu dengan cokolit dimana diperlukan pengawasan melekat dikedua tahapan tersebut namun keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi titik rawan ditahapan ini.

Rencana pengawasan yang disusun oleh Bawaslu kabupaten Bojonegoro diantaranya memberikan bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan dengan hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang membahas terkait jadwal tahapan, mekanisme verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, fokus pengawasan serta kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan secara melekat ke PPS. Setelah kegiatan bimbingan teknis di Bawaslu Kabupaten, juga diimbau kepada kecamatan untuk segera mungkin mengumpulkan PKD di kecamatan masing-masing untuk memberikan informasi yang telah didapat sehingga informasi yang telah didapat segera dipahami oleh PKD serta segera berkoordinasi dengan PPS setempat terkait jadwal verifikasi faktual. Fokus pengawasan yang ditekankan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada jajarannya yakni terkait pengisian alat kerja pengawasan (AKP), membuat form A hasil pengawasan serta dokumentasi pengawasan baik foto maupun video. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga mengimbau kepada Panwaslu Kecamatan agar selalu menjaga komunikasi agar kendala yang dihadapi dilapangan secara dapat diatasi dan mendapat solusi terbaik. Rencana pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan membagi jadwal pengawasan verifikasi faktual kesatu dengan rincian :

NO	HARI/TANGGAL	KECAMATAN	NAMA
1	Sabtu/ 11 Februari 2023	Balen, Kanor	Dian Widodo
			Siti Mukayah
			Shinta Bunga Lestari
2	Minggu/12 Februari 2023	Dander, Gayam, Purwosari	Mochammad Alfianto
			Muhajirin
			Siti Windaryati
3	Senin/13 Februari 2023	Kapas, Sumberejo, Baureno	Lilik Mustafidah
			Ahmad Fikri Faisal

			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
4	Selasa/14 Februari 2023	Malo, Trucuk	Mujiono
			Eva Rindias Yulia Devi
			Siti Kiswatun Khasanah
5	Rabu/15 Februari 2023	Kedungadem, Sugihwaras, Kepohbaru	Dian Widodo
			Ahmad Fikri Faisal
			Siti Windaryati
6	Kamis/16 Februari 2023	Margomulyo, Ngraho, Kedewan	Moch. Zaenuri
			Muhajirin
			Shinta Bunga Lestari
7	Jum'at/17 Februari 2023	Bojonegoro, Kalitidu, Kasiman	Lilik Mustafidah
			Siti Kiswatun Khasanah
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
8	Sabtu/18 Februari 2023	Tambakrejo, Ngasem, Sukosewu	Mochammad Alfianto
			Eva Rindias Yulia Devi
			Ahmad Fikri Faisal
9	Minggu/19 Februari 2023	Sekar, Gondang, padangan	Mujiono
			Muhajirin
			Siti Mukayah
10	Senin/20 Februari 2023	Bubulan, Temayang, Ngambon	Moch. Zaenuri
			Fibri Endi Ulfa Dira Kumala
			Siti Windaryati

4.1.14 Tabel Jadwal pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pencegahan dengan cara mengirim imbauan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro dengan nomor 035/PM.00.02/K.JI-04/02/2023 Tanggal 5 Februari 2023 yang berisi Membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal serta Tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Melaksanakan verifikasi faktual nama dukungan bakal calon anggota DPD oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menyampaikan *by name* nama dukungan bakal calon anggota DPD yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Menanggapi Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Bojonegoro mengirim balasan surat dengan nomor 159/PL.01.1/3522/2023 Tanggal 6 Februari 2023 dengan perihal jadwal kegiatan verifikasi faktual kesatu dukungan pemilih bakal calon anggota DPD. Selain itu kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni dengan membangun komunikasi dengan internal Bawaslu yakni Panwascam dan PKD serta komunikasi eksternal dengan KPU. Sampling dukungan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro

diberikan secara bertahap dikarenakan menunggu arahan dari KPU RI dengan mengacu pada rumus sampling yang ada, sehingga begitu penting membangun koordinasi dan kolaborasi antar sesama penyelenggara pemilu.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan mendelegasikan pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan diteruskan ke jajaran PKD di masing-masing Kecamatan. Untuk itu begitu penting pengisian AKP, Form A serta dokumentasi pada saat verifikasi faktual dilaksanakan. Hasil pengawasan Selama verifikasi faktual yang dilaksanakan kecamatan secara berkala dicek oleh Bawaslu kabupaten Bojonegoro terkait kelengkapan yang harus dilaporkan. Beberapa laporan yang belum lengkap juga menjadi cacatan di Bawaslu kabupaten Bojonegoro untuk sama-sama dicermati oleh Panwaslu Kecamatan terkait sinkronisasi data di Form A dan di AKP. Tahapan verifikasi faktual dilaksanakan berdampingan dengan tahapan coklit sehingga koordinasi serta kerjasama antara Panwaslu Kecamatan dan PKD agar proses pengawasan tetap berjalan pada kedua tahapan juga menjadi konsentrasi utama Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Pada saat melakukan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga memantau dan mengikuti proses verifikasi yang dilakukan PPS bersama PKD dengan mendatangi setiap rumah dukungan bakal calon Anggota DPD.

NO	KABUPATEN	NAMA BAKAL CALON DPD	JUMLAH TOTAL SAMPEL	JUMLAH DAFTAR PENDUKUNG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) HASIL VERIFIKASI FAKTUAL	CATATAN HASIL PENGAWASAN / KEJADIAN KHUSUS
1	BOJONEGORO	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	194	72	NIHIL
2	BOJONEGORO	AA. AHMAD NAWARDI	5	3	NIHIL
3	BOJONEGORO	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	7	7	NIHIL
4	BOJONEGORO	ADILLA AZIS	3	3	NIHIL
5	BOJONEGORO	AGUS RAHARDJO	2	0	NIHIL
6	BOJONEGORO	AYUB KHAN	14	3	NIHIL
7	BOJONEGORO	BAMBANG HARIYANTO	6	5	NIHIL

8	BOJONEGORO	CATUR RUDI UTANTO	9	6	NIHIL
9	BOJONEGORO	DODDY DWI NUGROHO	163	98	NIHIL
10	BOJONEGORO	EMILIA CONTESSA	35	27	NIHIL
11	BOJONEGORO	ERLYTA DWI A SIREGAR	189	138	NIHIL
12	BOJONEGORO	EVI ZAINAL ABIDIN	13	1	NIHIL
13	BOJONEGORO	KONDANG KUSUMANING AYU	21	4	NIHIL
14	BOJONEGORO	KUNJUNG WAHYUDI	100	21	NIHIL
15	BOJONEGORO	LIA ISTIFHAMA	88	19	NIHIL
16	BOJONEGORO	MOHAMMAD TRIJANTO	43	40	NIHIL
17	BOJONEGORO	NARTO SK DENTOPURO	21	17	NIHIL
18	BOJONEGORO	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	152	127	NIHIL

4.1.15 Tabel hasil pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu

Hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Bojonegoro menuangkan hasilnya dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan dijelaskan dalam grafik dibawah terkait dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu, jumlah total sample dan jumlah daftar pendukung TMS hasil Verifikasi Faktual.



4.2.5 Grafik Hasil pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu



4.3.9 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengikuti Verifikasi Faktual Kesatu bersama PPS Desa setempat dan PKD. Pembagian jadwal pengawasan Verifikasi Faktual serta sebaran Kecamatan telah disusun dan dilakukan jajaran Bawaslu. Verifikasi Faktual dilakukan oleh PPS dengan mendatangi setiap rumah dukungan dengan memastikan identitas dukungan serta menanyakan kerkaitan apakah yang bersangkutan benar-benar mendukung bakal calon anggota DPD atau tidak.



4.3.10 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan

Beberapa temuan pada saat verifikasi faktual kesatu yakni informasi atau jadwal verifikasi faktual dari PPK/PPS beberapa kurang responsif sehingga Panwascam maupun PKD tidak bisa melakukan pengawasan secara melekat. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat PPS yang belum atau terdapat kekurangan dalam menerima kelengkapan verifikasi faktual dari KPU Kabupaten selain itu proses verifikasi faktual dilaksanakan sesuai kesepakatan antar PPS tanpa berkoordinasi dari jauh hari dengan PKD sehingga penyampaian informasi mendadak serta PKD yang masih melakukan aktifitas lain tidak bisa melakukan pengawasan melekat. Selama proses verifikasi faktual dilakukan di rumah dukungan namun yang bersangkutan tidak dapat ditemui dikarenakan sedang bekerja atau alasan lain sehingga PPS maupun PKD memberikan opsi kepada dukungan untuk menyampaikan dukungan melalui panggilan video atau rekaman video. Terkait data dukungan yang diverifikasi juga menjadi persoalan di beberapa kecamatan dikarenakan PPS tidak mau memberikan data pribadi dukungan kepada PKD sehingga PKD harus mencari sendiri data dukungan tersebut.

Kegiatan verifikasi faktual kesatu juga mengalami kendala alam dikarenakan adanya banjir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Banjir tersebut terjadi dikarenakan curah hujan yang cukup intens sehingga menjadi salah satu masalah yang dihadapi dilapangan. Faktor lain juga terdapat beberapa desa yang tidak bisa diakses dikarenakan terdapat pembangunan jalan. Kendala alam maupun kegiatan pembangunan jalan menjadi permasalahan bersama antara KPU dan bawaslu dalam melakukan verifikasi dilapangan dan untuk itu menjadikan waktu verifikasi yang seharusnya dapat selesai lebih cepat menjadi harus diperpanjang menunggu kondisi dan akses bisa dijangkau. Tahapan verifikasi faktual juga berdampingan dengan tahapan cokolit sehingga pembagian waktu serta pelaksanaannya menjadi catatan bersama karena semua tahapan sama pentingnya. PPS maupun PKD harus menjalin komunikasi yang baik agar kedua tahapan tersebut selesai tepat waktu. Selain pengawasan melekat pada tahapan cokolit, PKD juga masih harus melakukan uji fakta terhadap keluarga yang dicokolit untuk memastikan tahapan ini dilakukan sesuai prosedur yang ada. Untuk itu baik tahapan verifikasi faktual dan tahapan cokolit harus diselesaikan sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi pada tahapan verifikasi faktual kesatu adalah KPU Kabupaten Bojonegoro harus lebih cermat dan teliti lagi dalam menyampaikan data yang akan dilakukan verifikasi faktual oleh jajaran tingkat dibawahnya. Hal ini berlandaskan bahwa data dukungan yang akan di verifikasi ternyata tertukar antar kecamatan serta terdapat juga dukungan yang bukan berasal dari kabupaten Bojonegoro. KPU Kabupaten Bojonegoro juga diimbau agar menyampaikan kepada jajaran PPK dan PPS agar koordinasi lebih intens dengan jajaran panwascam dan PKD, terutama tentang jadwal pelaksanaan teknis verifikasi faktual pencalonan DPD yang dilakukan jajaran di tingkat PPS sesuai dengan surat imbauan Bawaslu kabupaten Bojonegoro Nomor 025/PM.00.02/K.JI-04/02/2023 tanggal 5 Februari 2023. Hasil dari laporan Panwascam maupun PKD yang terlambat salah satunya dikarenakan oleh jadwal verifikasi faktual yang dilakukan PPS tanpa koordinasi dengan PKD terlebih dahulu. Rekomendasi tersebut disampaikan pada saat penyampaian hasil verifikasi faktual di kantor KPU Kabupaten Bojonegoro dan akan tindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan membangun komunikasi lebih intens untuk verifikasi faktual kedua nanti.

2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

Tahapan verifikasi faktual kedua dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2023 sampai 8 April 2023. KPU Kabupaten Bojonegoro mengirim surat dengan nomor 303/PL.01.1-SD/3522/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal pemberitahuan kegiatan verifikasi faktual kedua dukungan pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sampling verifikasi faktual kedua yakni terhadap dukungan bakal calon DPD tas nama Doddy Dwi Nugroho sejumlah 247 dukungan dan Lia Istifhama sebanyak 1 dukungan. Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari KPU, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengirimkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bojonegoro dengan nomor 096/PM.00.02/K.JI-04/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal pengawasan sub tahapan verifikasi faktual kedua pencalonan DPD. Uraian dari pengawasan tersebut yakni untuk segera berkoordinasi dengan PPK terkait jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kedua dan by name dukungan bakal calon anggota DPD yang akan diverifikasi serta melaksanakan pengawasan verifikasi faktual kedua nama dukungan bakal calon anggota DPD.

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN
1	DODDY DWI NUGROHO	L	247
2	LIA ISTIFHAMA	P	1
JUMLAH			248

4.1.17 Tabel sebaran dukungan Verifikasi Faktual Kedua

KPU Kabupaten Bojonegoro mengirim surat dengan nomor 341/PL.01.1-SD/3522/2023 tanggal 5 April 2023 perihal pemberitahuan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD atas nama Aisyah Aleena Maheswari Novinda dan Siti Rafika Hardhiansari pada tanggal 6 April sampai dengan 8 April 2023 sesuai dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01/PS.REG/35/III/2023 dan 02/PS.REG/35/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Sampling dukungan bacalon atas nama Aisyah Aleena Maheswari Novinda sejumlah 13 dukungan dan bacalon atas nama Siti Rafika Hardhiansari sebanyak 65 dukungan. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga mengirim pemberitahuan pengawasan terhadap dukungan bakal calon tersebut kepada Panwaslu Kecamatan yang kemudian diteruskan ke PKD masing-masing wilayah.

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	P	13
2	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	P	65
JUMLAH			78

4.1.18 Tabel sebaran sampling dukungan Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Kerawanan pada tahapan verifikasi faktual kedua ini tidak jauh berbeda dengan tahapan verifikasi faktual kesatu yakni koordinasi terkait jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS tanpa pemberitahuan kepada PKD selain itu permasalahan terkait dukungan yang sulit ditemui juga masih menjadi titik rawan pelaksanaan tahapan. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberitahukan kepada jajarannya agar berkoordinasi lebih intens dengan Panwascam maupun PKD terkait jadwal verifikasi faktual dan juga terus mengingatkan Panwascam untuk membangun komunikasi yang baik. Rencana

pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni terus menekankan untuk memperhatikan pengisian alat kerja pengawasan, Form A serta dokumentasi baik foto maupun video. Pengawasan pada tahapan ini juga ditekankan untuk KPU agar pendistribusian kelengkapan verifikasi faktual diteliti dan dicermati agar tidak ada kelengkapan yang tertukar dengan antar kecamatan. Rencana pengawasan yang dilakukan Bawaslu dengan menyusun jadwal pengawasan dengan rincian :

NO	HARI/TANGGAL	NAMA	KECAMATAN
1	Kamis/30 Maret 2023	Mujiono	Sugihwaras
		Eva Rindias Yulia Devi	Kedungadem
		Siti Kiswaton Khasanah	
2	Jum'at/31 Maret 2023	Moch. Zaenuri	Kanor
		Fibri Endi Ulfa Dira Kumala	Balen
		Siti Mukayah	
3	Sabtu/01 April 2023	Dian Widodo	Gondang
		M. Muhajirin	Temayang
		Shinta Bunga Lestari	
4	Minggu/02 April 2023	Lilik Mustafidah	Kapas
		Siti Windaryati	Bojonegoro
		Ahmad Fikri Faisal	
5	Senin/03 April 2023	Mochammad Alfianto	Kalitidu
		Siti Mukayah	Dander
		Siti Windaryati	
		Umi Ma'rifah	
6	Selasa/04 April 2023	Dian Widodo	Trucuk
		Ahmad Fikri Faisal	
		Fibri Endi Ulfa Dira Kumala	
7	Rabu/05 April 2023	Moch. Zaenuri	Kepohbaru
		Eva Rindias Yulia Devi	Sumberejo
		Shinta Bunga Lestari	
		Umi Ma'rifah	
8	Kamis/06 April 2023	Mochammad Alfianto	Ngraho
		M. Muhajirin	
		Siti Kiswaton Khasanah	
9	Jum'at/07 April 2023	Mujiono	Kasiman
		Ahmad Fikri Faisal	Kedewan
		Siti Mukayah	
10	Sabtu/08 April 2023	Lilik Mustafidah	Gayam
		Fibri Endi Ulfa Dira Kumala	
		Eva Rindias Yulia Devi	

4.1.19 Tabel Jadwal pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

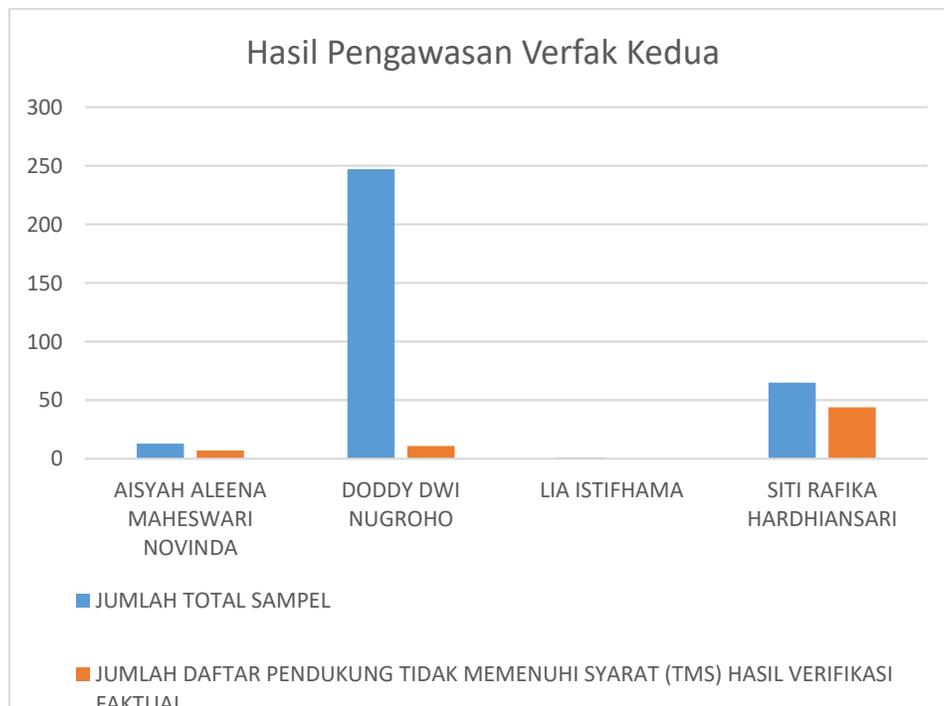
2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan

Pencegahan tahapan verifikasi faktual kedua yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni dengan mengirim surat imbauan dengan nomor 092/PM.00.02/K.JI-04/03/2023 tanggal 24 maret 2023 yang berisi membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kedua dan menyampaikan jadwal serta Tim verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Melaksanakan verifikasi faktual kedua nama dukungan bakal calon anggota DPD oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU No 10 Tahun 2022 Pasal 126 yang berbunyi “Ketentuan mengenai verifikasi factual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi factual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota”, Menyampaikan *by name* nama dukungan bakal calon anggota DPD yang akan dilakukan verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan no telepon LO bakal calon anggota DPD untuk Verifikasi Faktual Kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tidak jauh berbeda dengan Verifikasi Faktual Kesatu, pengawasan dilakukan dengan mengikuti PPS desa setempat bersama PKD mendatangi setiap rumah dukungan dengan membawa kelengkapan verifikasi. Pengawasan yang dilakukan pada tahapan ini yakni dengan melakukan pengawasan melekat bersama jajaran KPU Kabupaten Bojonegoro dengan rincian :

NO	KABUPATEN	NAMA BAKAL CALON DPD	JUMLAH TOTAL SAMPEL	JUMLAH DAFTAR PENDUKUNG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) HASIL VERIFIKASI FAKTUAL	CATATAN HASIL PENGAWASAN / KEJADIAN KHUSUS
1	BOJONEGORO	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	13	7	NIHIL
2	BOJONEGORO	DODDY DWI NUGROHO	247	11	NIHIL
3	BOJONEGORO	LIA ISTIFHAMA	1	0	NIHIL
4	BOJONEGORO	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	65	44	NIHIL

4.1.19 Tabel Hasil pengawasan Verifik Kedua

Setelah tahapan Verifikasi Faktual Kedua dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan hasil pengawasan seperti pada grafik dibawah yang berisi jumlah total sampel dan jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil Verifikasi Faktual.



4.2.6 Grafik Hasil pengawasan Verifik Kedua



4.3.11 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

Verifikasi Faktual Kedua dilaksanakan setelah Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mendapat surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Bojonegoro terkait sebaran dan jumlah dukungan yang harus diverifikasi. Proses verifikasi juga dilakukan dengan mendatangi rumah setiap dukungan dan memastikan identitas beserta status dukungan kepada yang bersangkutan.



4.3.12 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan

Temuan ditahapan verifikasi faktual kedua tidak ada dikarenakan segala bentuk antisipasi dan temuan pada tahapan verifikasi faktual kesatu telah diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selalu menjaga agar setiap orang atau dukungan menyalurkan hak nya untuk memilih dalam pemilu 2024 mendatang sehingga Bawaslu selalu melakukan sinkronisasi data dengan KPU agar tercapai tujuan tersebut. Dukungan yang tidak bisa ditemui pada saat verifikasi faktual diberikan wadah untuk menyampaikan dukungannya melalui panggilan video atau rekaman video sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Terkait koordinasi antara PPK/PPS dan Panwascam/PKD telah berjalan dengan lancar dan koordinasi telah terjalin dengan baik. Selama verifikasi faktual kedua berlangsung PKD selalu melakukan pengawasan melekat dengan PPS dimasing-masing kecamatan sehingga hasil verifikasi pun telah tuntas dan selesai sesuai ketentuan.

2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak lanjut Rekomendasi

Rekomendasi selama tahapan verifikasi faktual kedua dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni untuk selalu menjaga komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara pemilu. Selain itu terkait data dukungan yang diverifikasi yang tidak sesuai dengan alamat maka perlu dicermati dan diteliti kembali agar tidak ada formulir verifikasi faktual yang tertukar. Tidak banyak rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro karena beberapa temuan yang sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro sejak verifikasi faktual kesatu. Tidak banyak catatan yang perlu ditindaklanjuti, selain karena koordinasi sudah berjalan dengan baik, jumlah dukungan yang perlu diverifikasi tidak terlalu banyak sehingga tahapan verifikasi faktual kedua berjalan dengan kondusif.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selama tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro telah disusun dari mulai kerawanan serta rencana pengawasan yang telah diuraikan baik dalam bentuk table maupun narasi baik antisipasi terkait hal-hal yang mungkin terjadi disetiap tahapan serta langkah untuk mengantisipasi kejadian tersebut secara detail. Selanjutnya pembahasan terkait pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yakni dengan mengirimkan imbauan disetiap tahapan ke KPU Kabupaten Bojonegoro serta melakukan pengawasan baik prosedur/melekat serta output/silon. Untuk pengawasan verifikasi faktual juga dilakukan oleh PKD dimasing-masing kecamatan dengan jumlah sampling yang sudah dibagikan. Temuan selama tahapan berlangsung tidak begitu fatal, kebanyakan terkait teknis atau administasi yang harus lebih didorong terkait keterbukaan dan membangun koordinasi yang baik. Hasil temuan Bawaslu juga selalu disampaikan ke KPU sehingga ketidakcocokan data bisa segera mendapat solusi. Terhadap rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi telah banyak dibahas sebelumnya bahwa KPU serta jajarannya terus diingatkan untuk tetap solid dengan jajaran Bawaslu di tingkat Kecamatan maupun Desa.

3.2 Rekomendasi

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan menyarankan KPU untuk lebih cermat dan teliti pada saat verifikasi data dukungan. Segala bentuk temuan yang disampaikan Bawaslu agar menjadi bahan diskusi bersama dan saling mengevaluasi diri antar lembaga sehingga demokrasi bisa tercapai. Kecermatan pada saat melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan juga menjadi begitu penting mengingat setiap orang berhak memberikan atau menyalurkan aspirasinya. Namun untuk dukungan yang belum terupload di F1 Silon Bawaslu juga menjadi catatan tersendiri bagi lembaga dikarenakan kurangnya transparansi data. Rekomendasi lain yakni terkait sinergi KPU Kabupaten Bojonegoro untuk mengkoordinir jajaran dibawahnya yakni PPK maupun PPS dengan Panwascam maupun PKD untuk saling menjalin hubungan bilateral yang baik antar penyelenggara pemilu. Kesuksesan pemilu salah satunya ditentukan dari harmonisasi antara KPU dan Bawaslu diseluruh tingkatan sehingga begitu penting membangun komunikasi yang utuh.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

4.1 DAFTAR TABEL

- 4.1.1 Tabel Susunan Tm Fasilitas Pencalonan DPD Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
- 4.1.2 Tabel Dukungan Verifikasi Administrasi Awal
- 4.1.3 Tabel Kerawanan Verifikasi Administrasi Awal
- 4.1.4 Tabel Jadwal Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal
- 4.1.5 Tabel Hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Awal
- 4.1.6 Tabel Sebaran Dukungan Tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.1.7 Tabel Jadwal Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.1.8 Tabel Hasil Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.1.9 Tabel Laporan Masyarakat Tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.1.10 Tabel Sebaran Bacalon Anggota DPD Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
- 4.1.11 Tabel Jadwal Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
- 4.1.12 Tabel Hasil Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
- 4.1.13 Tabel Sebaran Dukungan Bacalon Anggota DPD Tahapan Verifikasi Kesatu
- 4.1.14 Tabel Sebaran Dukungan Bacalon Anggota DPD Verifikasi Kesatu Susulan
- 4.1.15 Jadwal Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu
- 4.1.16 Tabel Hasil pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu
- 4.1.17 Tabel Sebaran Dukungan Verifikasi Faktual Kedua
- 4.1.18 Tabel Sebaran Sampling Dukungan Verifikasi Faktual Kedua
- 4.1.19 Tabel Jadwal Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua
- 4.1.20 Tabel Hasil pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

4.2 DAFTAR GRAFIK

- 4.2.1 Grafik Perbandingan Jenis Kelamin Bakal Calon Perseorangan
- 4.2.2 Grafik Dukungan BMS Verifikasi Administrasi Awal
- 4.2.3 Grafik Hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.2.4 Grafik Hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
- 4.2.5 Grafik Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu
- 4.2.6 Grafik Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

4.3 DAFTAR GAMBAR

- 4.3.1 Gambar Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal
- 4.3.2 Gambar Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal
- 4.3.3 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.3.4 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.3.5 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
- 4.3.6 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
- 4.3.7 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
- 4.3.8 Gambar Pengawasan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
- 4.3.9 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu
- 4.3.10 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu
- 4.3.11 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua
- 4.3.12 Gambar Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

4.4 SURAT EDARAN

4.4.1 Surat Edaran Nomor 37 tahun 2022



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth: 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.
2. Panwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR: 37 Tahun 2022

TENTANG

PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Latar belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **Dewan Perwakilan Daerah**, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 97 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian menurut Pasal 261 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada satu sisi, saat ini telah memasuki masa tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pedoman teknis, namun disisi lain Bawaslu masih memproses perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

4.4.2 Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.
2. Panwaslih Provinsi Aceh.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR 3 Tahun 2023

TENTANG

PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SERTA
PENETAPAN PADA TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Lebih lanjut Pasal 97 huruf b angka 4 UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon

4.5 INTRUKSI PENGAWASAN

4.5.1 Intruksi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Desember 2022



Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/Fax : (031) 99149481
Email : aset.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 027/PM.00.01/K.JI/12/2022 30 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan
Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa
Timur

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar:

1. Membentuk tim fasilitas sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 2 Januari 2023 melalui email aset.jatim@bawaslu.go.id;
2. Menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk memperoleh akses SILON, dengan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui email aset.jatim@bawaslu.go.id paling lambat tanggal 2 Januari 2023;
3. Menginformasikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1 (satu) anggota beserta nomor telpon tim fasilitas pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 melalui Sdr. Amryzal Perdana (Sekertaris Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024) 08976446648 paling lambat tanggal 2 Januari 2023.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua,

A. Warits, S.Sos

4.5.2 Intruksi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Januari 2023



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/Faximile : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 0 2 4 /PM.00.01/K.JI/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Instruksi

12 Januari 2023

Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur

di -

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau himbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD;
2. Mengefektifkan Posko Aduan Masyarakat guna menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
3. Dalam hal terdapat aduan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam SILON, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta kepada masyarakat untuk mengisi "FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD (sebagaimana terlampir)", dan wajib menindaklanjuti dan meneruskan aduan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, guna dilakukan penghapusan data sebagaimana mestinya;
4. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi setiap hari senin pukul 12.00 WIB melalui link <https://bit.ly/3RCJDS2>

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya terima kasih.

Ketua,

A. Warits, S.Sos.

4.6 SURAT IMBAUAN

4.6.1 Imbauan Verifikasi Administrasi Awal



Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : net.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 014/PM.00.02/KJ-04/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

10 Januari 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. Memperhatikan:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
 - h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - i. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 627/PM.00.01/KJ/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur;
 - j. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 793/PL.01.1/3522/2022 tentang Pemberitahuan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Berdasarkan jadwal tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sub tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur yang berakhir pada tanggal 12 Januari 2023 dan jumlah dukungan yang sudah terverifikasi 314 dari jumlah dukungan keseluruhan 2506 yang harus diverifikasi, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menghimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:
 - a. Melaksanakan Verifikasi Administrasi tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Mandiri, b) Jujur, c) Adil, d) Berkepastian Hukum, e) Tertib, f) Terbuka, g) Proporsional, h) Profesional, i) Akuntabel; j) Efektif, k) Efisien dan l) Aksesibel;

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.

4.6.2 Imbauan Perbaikan Verifikasi Administasi Kedua



Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : sel.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 065/IPM.00.02/K.JI-04/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

10 Maret 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
 - h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - i. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 627/IPM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur;
 - j. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 793/PL.01.1/3522/2022 tentang Pemberitahuan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Berdasarkan jadwal tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sub tahapan Verifikasi Administrasi Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur yang dimulai pada tanggal 12 sampai 21 Maret 2023, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:
- a. Melaksanakan Verifikasi Administrasi kedua tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dasar hukum diatas;
 - b. Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Mandiri, b) Jujur, c) Adil, d) Berkepastian Hukum, e) Tertib, f) Terbuka, g) Proporsional, h) Profesional, i) Akuntabel; j) Efektif, k) Efisien dan l) Aksesibel;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUCH. ZAENURI, ST

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.

4.6.3 Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu



Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254866
Email : pet.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-04/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

5 Februari 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di
BOJONEGORO

1. Menyerahkan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Penseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Penseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Penseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Penseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual nama dukungan bakal calon anggota DPD) pada 6 s.d 26 Februari 2023 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal serta Tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- b. Melaksanakan verifikasi faktual nama dukungan bakal calon anggota DPD oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan *by name* nama dukungan bakal calon anggota DPD yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

MOCH. ZAENURI, ST

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.

4.6.4 Imbauan Verifikasi Faktual Kedua



- a. Membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kedua dan menyampaikan jadwal serta Tim verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- b. Melaksanakan verifikasi faktual kedua nama dukungan bakal calon anggota DPD oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU No 10 Tahun 2022 Pasal 126 yang berbunyi "Ketentuan mengenai verifikasi factual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi factual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota";
- c. Menyampaikan *by name* nama dukungan bakal calon anggota DPD yang akan dilakukan verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
- d. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan no telepon LO bakal calon anggota DPD untuk verifikasi faktual kedua kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.

4.7 SURAT KEPUTUSAN TIMFAS DPD BAWASLU KAB BOJONEGORO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOJONEGORO
NOMOR : 162/PM.00.02/K.JI-04/12/2022



TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
BOJONEGORO

KETUA BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang: a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 28 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor 002/PM.00.02/K.JI-04/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketepatan

prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal, 31 Desember 2022

Ketua Bawaslu

Kabupaten Bojonegoro



Moch. Zaenuri, ST

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I <i>Kordinator dan Pengarah</i>			
1.	Moch. Zaenuri, ST	Ketua Bawaslu	Kordinator
2	Dian Widodo, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pengarah
3	Lilik Mustafidah, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pengarah
4	Mochammad Alfianto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Pengarah
II <i>Penanggung Jawab</i>			
5	Mujiono, SH	Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III <i>Ketua dan Wakil Ketua</i>			
6	Eva Rindias Yulia Devi	Staf Pelaksana Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	Ketua
7	Ahmad Fikri Faisal	Staf Pelaksana Divisi PPH	Wakil Ketua
IV <i>Sekretaris</i>			
8	Dawam, SE	BPP	Sekretaris
V <i>Anggota</i>			
9	Shinta Bunga Lestari	Staf Pelaksana Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Fibri Endi Ulfa Dira Kumala	Staf Pelaksana Divisi OSDM	Anggota
11	Siti Windaryati	Staf Pelaksana Divisi PP	Anggota
12	M. Muhajirin	Staf Pelaksana Divisi PP	Anggota
13	Siti Kiswatun Khasanah	Staf Pelaksana Divisi PPH	Anggota
14	Siti Mukayah	Staf Pelaksana Divisi OSDM	Anggota

4.8 BERITA ACARA

4.8.1 BA HASIL VERFAK KESATU (AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rasyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 97/PL...01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/(KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

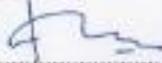
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/(kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawasu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROHBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN MODEL EM. VERPAK. PONDOKLUNG. DPD- KPU. KAB. BOJA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL JESATU/ISSUANY
 DIKUNJUNGAN MINIMAL PRIBADI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWILAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: MA LA NAILLA MAHMUD NATYALITTI

NO	WILAYAH	JUMLAH SALIPR. (4-5)	HASIL VERPAK		TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terdapat Vertikal MS	Terdapat Vertikal TMS	Jumlah (6-7)	MS (1-3)	TMS (1-3)
1	KAB. BOJONEGORO	3	122	72	0	0	0	122	72

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : FATMUR RICHMAN
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFIRIN
4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLISIN
5. Anggota : ROBBY AULI FERMANA



4.8.2 BA HASIL VERFAK KESATU (AA. AHMAD NAWARDI)



LAMPIRAN MODEL BA VERBAL PERDULUNG DPD-KPU KAB/WOTA

HARI, VENIHRASE PARTIAL KESATU/KEBALAH*
DISTRIBUSI NEGARA PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERMUSKILAN DAERAH
PROGRAM JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPD: AA. AHMAD SAWARDE

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPUL (A+B)	HARI, VENIHRASE		TANGKAPAN MASS/BAKAL		JUMLAH		TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Versi MS	Terhadap Versi TMS	(A-C)	(B-D)		
1	KAB. BOJONEGORO	5	2	3	0	0	0	2	3	

KOMISI PERALIHAN WILAYAH
KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : PATRIKUR ROHMAN
2. Anggota : PATMA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFIRIN
4. Anggota : MOCHAMMAD MUDHILLIRIN
5. Anggota : ROBBY ADI PERWIRTA



[Handwritten signatures and names of the commission members]

4.8.3 BA HASIL VERFAK KESATU (ABDUL QADIR AMIR HARTONO)

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 99/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

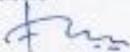
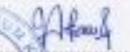
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama ABDUL QADIR AMIR HARTONO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN MODUL BA VERBAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB./KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL RESPTI/REBPAJ
DURUNGAN NISNAIL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAS PERWARDAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggotu DPT: ABDUL QADIR ABIR HARITOMO

NO	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (n+5)	HASIL VERBAK		TAROGAPAN KASTYABAKAT		TOTAL	
			MN	TMS	Terdapat Versi MS	Terdapat Versi TMS	Jumlah (6-7)	MS (8-9)
1	KAB BOJONEGORO	7	0	7	0	0	0	7

KONSE PENJELIHAN URUM
KAB. BOJONEGORO

- 1. Ketua : PATRIUS ROHMAR
- 2. Anggota : PATMA LESTARI
- 3. Anggota : MUSTOFIRI
- 4. Anggota : MUCHAMAD MUCILILAH
- 5. Anggota : ROBY ADI PERWIRA



4.8.4 BA HASIL VERFAK KESATU (ADILLA AZIS)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moeh. Soeyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 100/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/(KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/(kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama ADILLA AZIS

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua :	FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota :	PATMA LESTARI	
3. Anggota :	MUSTOFIRIN	
4. Anggota :	MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota :	ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN MOJES, BA, VERPAK, PENDUKUNG DPD, KPU KAB/NOTA

DAFTAR VERIFIKASI PARTAI/RESMI
DINUNJUKAN MENYALAKI PEMILIH BAWASLU CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: ADILLA AZIS

NO.	WILAYAH	JUMLAH SALURAN M+D	HASIL VERPAK		TANGGAPAN MAJELAS/DK		MIS		TOTAL	
			M	D	Terhadap Verba NS	Verba TMS	NS	ADG	M+D	TMS
1	KAB. BOJONEGORO	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2										

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : PATRIKUS HOHNAN
2. Anggota : PATNYA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFIRIN
4. Anggota : MUCHAMMAD MUCHLISHIN
5. Anggota : ROBERT ADE PERWIRA



4.8.5 BA HASIL VERFAK KESATU (AGUS RAHARDJO)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moeh. Roeyid No.93 Pacul Bojonegoro

BERITA ACARA
NOMOR 101/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/(KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/(kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama AGUS RAHARDJO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua :	FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota :	FATMA LESTARI	
3. Anggota :	MUSTOPIRIN	
4. Anggota :	MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota :	ROBBY ADI PERWIRA	



4.8.6 BA HASIL VERFAK KESATU (AYUB KHAN)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

BERITA ACARA
NOMOR 102/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI PAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

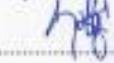
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama AYUB KHAN

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN MODEL SK VERBAK PSEKUTUONG DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

LABEL VERBAK EKSPERIAL (KORPRI/INDUKAT)
DOKUMEN MINIMAL PERILAH BEROL CACUM ANGGOTA DEWAN PERKAWILAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD AYUDH KIKAN

NO	WILAYAH	JUMLAH SAMPLE PUS	LABEL VERBAK MS	TUN	TANGGAPAN MATERI VERBAK MS	TANGGAPAN MATERI VERBAK TUN	Jumlah Jawab	MS PUS	TUN PUS
1	KAB. BOJONEGORO	18	4	11	0	0	0	4	11
TOTAL									
								MS	TUN
								4	11
								PUS	18
								4	3

KORPRI PEMILIHAN CALON
KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : ZETRIJICR BOUNJAS
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFISAN
4. Anggota : MICHANMAD MULCHUSIR
5. Anggota : ROBBY ADI PERMATA



4.8.7 BA HASIL VERFAK KESATU (BAMBANG HARIANTO)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moeh. Roeyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 103/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama BAMBANG HARIANTO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawahu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua :	FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota :	FATMA LESTARI	
3. Anggota :	MUSTOFIRIN	
4. Anggota :	MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota :	ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN NO.081. BA. VERPAK. PENDUKUNG DPRD-KAB./KOTA

**HASIL VERIFIKASI PARTAI/KELOMPOK
DUNILUNGAN KEMBALA PEMILIH BAWASLU CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Nama Bakal Calon Anggota DPRD. BAMBANG HARJANTO

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAHABIL (P+S)	HASIL VERIFIKASI					TANGGAPAN MASYARAKAT		JUMLAH (P+S)	TOTAL	
			MS	TMS	Verifikasi MS	Verifikasi TMS	0	0	MS (4-9)		TMS (4-10)	
1	KAB. BOJONEGORO	6	1	4	0	0	0	0	0	1	5	

KOMISI PEMILIHAN DPRD
KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : PATRIKUR ROHMAN
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : MISTOFIRIN
4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLISIN
5. Anggota : ROBBY ADI PERWIRA



4.8.8 BA HASIL VERFAK KESATU (CATUR RUDI UTANTO)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. R. H. E. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 104/PL. 01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEGUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

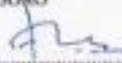
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama CATUR RUDI UTANTO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawahan Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua :	PATKHUR ROHMAN	
2. Anggota :	FATMA LEITARI	
3. Anggota :	MUSTOFIRIN	
4. Anggota :	MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota :	ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN BOCOR DAN VESPAK: PENCALONAN DPD KOTA KUALA LUMPUR

DAFTAR VERIFIKASI PARTIAL (BERSAMA SERTA)
 DAN BUKTI BAYAR PERILAH BUKTI CALON ANGGOTA DIBAWA PERKAWAJIAN (DAFTAR)
 PARTIAL JAWA TERUS
 KOTA BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPD: CATTUR RIZKI UTAMTO

NO	WILAYAH	JENJALAN SAMPUL (P-3)	HASIL VESPAK		TANGGAPAN MASTERSKANT		TOTAL		
			MS	THS	Tanggapan Verbal MS	Tanggapan Verbal THS	MS (P-3)	THS (P-3)	
1	KAB. BOJONEGORO	5	3	6	0	0	0	3	6

KOMISI PENGUSULAN LAMPIRAN
 KOTA BOJONEGORO

1. Ketua : PATRIKUS BOHARU
2. Anggota : PATRIKA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFISRI
4. Anggota : MUCAHAND MUCIUSRI
5. Anggota : ROBBY ALI PRINIA



4.8.9 BA HASIL VERFAK KESATU (DODDY DWI NUGROHO)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

BERITA ACARA
NOMOR 105/PL..01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDEWA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

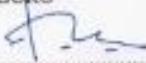
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/keedwa*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama DODDY DWI NUGROHO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLJISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN BOKORIL BA VERBAK PENDUKUNG DPD KPU KAB/KOTA

RAJAT, VIKTORIKASI PARTIAL KESATU (RASAJA)
 DINIWIJAN MINERAL PAMULI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWILAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD : DODOT TRI WICRODHO

NO.	WILAYAH	JUMLAH BAPPEL (P+S)	HABIS VERBAK		TANGGAPAN HASTAMBAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terdapat Verbak MS	Terdapat Verbak TMS	Jumlah M=7	MS M=8	TMS M=3
1	KAB BOJONEGORO	163	65	98	0	0	0	65	98

BOKORIL PENDUKUNG UJUNG
 KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : FITZGUR ROSMANA
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : MURTOPRIN
4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLISIN
5. Anggota : ROBIY ADI PERWANA



4.8.10 BA HASIL VERFAK KESATU (EMILIA CONTESSA)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rasyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 107/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

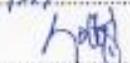
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama EMILIA CONTESSA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawahan Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



HASIL VERBALE PARTIAL RESISTU (MAMBA)
 DESKUSIAN BERNAMA PENILIT BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWAJAN DANBAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KAB. BOJONEGORO

Daftar Dialek Calon Anggota DPRD EMILIA CONTESMA

NO	WELAYAT	JENJANG SARAFOL (F+5)	HASIL VERBALE		TANGGAPAN KERTABALAK		TOTAL		
			MS	THR	Terdapat Verbal MS	Terdapat Verbal THR	Jumlah (F+7)	MS (F+6)	THR (F+8)
1	KAB. BOJONEGORO	25	8	27	0	0	0	8	27

KORPRI PENELITIAN UMUM
 KAB. BOJONEGORO

1. Wicara : PATRISTUR ROHMANN
2. Anggota : FITRIKA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFIDIN
4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLISIN
5. Anggota : ROBBY ALDI PERWISA

4.8.11 BA HASIL VERFAK KESATU (ERLYTA DWI A SIREGAR)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

BERITA ACARA
NOMOR 106/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/~~KEDUA~~^{*}
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/~~kedua~~^{*} terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama ERLYTA DWI A SIREGAR

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN
2. Anggota	: FATMA LESTARI
3. Anggota	: MUSTOFIRIN
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA



LAMPIRAN NOBEL BA VERBAK PERLOKUSI, DPG-KPU KAB/BOJA

**DAFTAR VERBAKAS PARTIAL KESEKUTU/KEBIDUKAN,
DUNYUAN MERSAL PERLEH SAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERKAWILAN DASRAK
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Nama Babak Calon Anggota DPRD : ERIYTA DWI A SIBSILAR

NO	MULYAKI	Jumlah Suara P+3	HASIL VERBAK		TANGGAPAN MAJELISAN			TOTAL	
			MS	TMS	Tesdng Verba MS	Tesdng Verba TMS	Jumlah 0-7	MS P+3	TMS P+3
1	KAB. BOJONEGORO	189	51	138	0	0	0	51	138

KORRES PERLEHIAN LUNDA
KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : FATMULIR ROHMANS
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFIDIN
4. Anggota : MUHAMMAD MUHAMMAD
5. Anggota : ROBERT ALI PRATIWA

4.8.12 BA HASIL VERFAK KESATU (EVI ZAINAL ABIDIN)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyidi No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 108/PL..01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Padu hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama EVI ZAINAL ABIDIN

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN
2. Anggota	: FATMA LESTARI
3. Anggota	: MUSTOFIRIN
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA



LAMPIRAN MODEL DA VERBALE PENDUKUNG DPD-SPD KAB/NOTA

HASIL VERIFIKASI PARTAIKAL NESATU/KEBUNTA
DUKUNGAN MINIMAL PEMILU BALAK CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DASAR
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Nama Balak Calon Anggota DPD: ENI ZAINAL ABDEN

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPUL (P+S)	HASIL VERBALE		TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verbal MS	Terhadap Verbal TMS	Jumlah (P+S)	MS M-S	TMS P-S
1	KAB. BOJONEGORO	13	4	1	0	0	0	14	1

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOJONEGORO

- 1. Ketua : FATHUR ROHMAN
- 2. Anggota : FATMA LESTARI
- 3. Anggota : MUSTOFISIN
- 4. Anggota : MUHAMMAD MUCHELBIN
- 5. Anggota : ROISY ADI PERWINDA



4.8.13 BA HASIL VERFAK KESATU (KONDANG KUSUMANING AYU)

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 109/PL..01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama KONDANG KUSUMANING AYU

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN
2. Anggota	: FATMA LESTARI
3. Anggota	: MUSTOFIRIN
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA



LAHARUS MOJOL DA VERBAK PENYINGKUNG DPD-KPU KABUNORA

DAFTAR VERBAKAS PASIUTAL KEKATU: **KEKATU**
DOKUMENTASIBESAL PASIUTAL PASIUTAL CALON PASIUTAL TERKAIT TERKAIT PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Daftar VerbaK Calon Anggota DPRD KEMUKAMU KUSILMANNING AYU

NO.	WILAYAH	JURAGAL DAKAT P.13	HABE VERBAK		TANGGAPAN WAKILDAKAT		TOTAL		
			MS	TRIS	Solusio Verba MS	Tolusio Verba TRIS	Jumlah P.13	MS P.13	TRIS P.13
1	KAB. BOJONEGORO	31	17	8	3	0	0	17	8

KORUS MOJOLAN LAMU
KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : PATRIK RICHMAN
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : NUDOTORN
4. Anggota : MICHHAARD MUCCHUSIN
5. Anggota : ROSBY AIN PRINRINA



4.8.14 BA HASIL VERFAK KESATU (KUNJUNG WAHYUDI)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

BERITA ACARA
NOMOR 110/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/(KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/(kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama KUNJUNG WAHYUDI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO

1. Ketua : FATKHUR ROHMAN
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFIRIN
4. Anggota : MUCHAMAD MUCHLISIN
5. Anggota : ROBBY ADI PERWIRA



LAHIRAN MODEL BA. VERPAK PENJUKUNG DPD-KPU KAB. BOJA

HASIL VERIFIKASI PASIUTAN KESATU/KEBUNGAN
DURUNGKAN MENDAL PESIRABE BAKAL CALON ANGGOTA TERPILIH PERMUKHLAN DASAR
KABUPATEN BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD KUNJUNGO WARTONO

NO	WILAYAH	JUNJUM SAMPUL P-19	HASIL VERPAK		TANGGAPAN MASYARAKAT		MS P-19	TOTAL	
			MS	TMS	Terdapat Vertikal MS	Terdapat Vertikal TMS		Jumlah (P-19)	MS P-19
1	KAB. BOJONEGORO	1/0	79	21	0	0	0	79	21

KOMISI PEMBILANG LULUS
KAB. BOJONEGORO

- 1. Ketua : PATRULUS SOHMAN
- 2. Anggota : PATMA LESTARI
- 3. Anggota : MURTOFIN
- 4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLISIN
- 5. Anggota : KOSIR ADI PERWIRA



(Handwritten signatures and initials)

4.8.15 BA HASIL VERFAK KESATU (LIA ISTIFHAMA)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU.KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacal Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 111/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

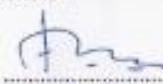
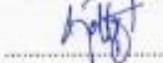
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama LIA ISTIFHAMA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN MODEL BA VERPAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/ROTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL SESUATU/SEDAPATI
 DIKUNCIKAN NERIMAL PENBIBIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERMADIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: LIA ISTIYAHMA

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPUL (P-S)	HABIL VERPAK		TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verpak MS	Terhadap Verpak TMS	Jumlah (P-S)	MS (P-S)	TMS (P-S)
1	KAB. BOJONEGORO	88	69	19	0	0	0	69	19

KOMISI PEMUDAHAN LULUAS
 KAB. BOJONEGORO

- 1. Ketua : FATMUR ROHMAM
- 2. Anggota : FATMA LESTARI
- 3. Anggota : MUSTOFIDIN
- 4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLILBIN
- 5. Anggota : ROBBY ADI PERMUDA



4.8.16 BA HASIL VERFAK KESATU (MOHAMMAD TRIJANTO)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 113/PL..D1.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

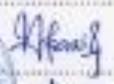
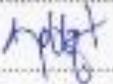
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama MOHAMMAD TRIJANTO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawastu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



LANJUTAN MODEL BA. VERBAK RESIDU/UNDUK DPRD APRIL KABUPATEN BOJONEGARA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL NEGATIF BERDASAR
 ELEMENAN MENYALAKAN PERSELESIAN CALON ANGGOTA DENGAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 KABUPATEN BOJONEGARA

Nama Bakal Calon Anggota DPRD: MUHAMMAD TULUANTO

NO.	NAMA	JINIS KAH SUKSES (P+S)	JABAT VERBAK		TANGGAPAN WARGAWA		Jumlah M-2 S	MS (M-S)	TOTAL
			MS	TMS	Terhadap Verbak MS	Terhadap Verbak TMS			
1	KAB. BOJONEGARA	43	3	40	0	0	0	3	40

NO. REGISTRASI
 KABUPATEN BOJONEGARA

1. Ketua : FATHUL KHOMAN
2. Anggota : FATMA LESTARI
3. Anggota : MUSTOFIRIN
4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLISIN
5. Anggota : ROBERT AIN TERPILIR

NO. REGISTRASI
 KABUPATEN BOJONEGARA

4.8.17 BA HASIL VERFAK KESATU (NARTO SK DENTOPURO)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rasyid No.93 Pacul Bojonegoro

**BERITA ACARA
NOMOR 112/PL..01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama NARTO SK DENTOPURO

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO**

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN MODEL BA VERPAK PENJUNJUNG DPRD-KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/SEDUJUK
DUNYUJUK MINIBAL PEMEDI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

Nama Bakal Calon Anggota DPR: NIKETO SK DINTOPURNO

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPUL (n-2)	HASIL VERPAK		TAYOGARAN NASYADUN		TOTAL	
			MS (n-4)	TMS (n-5)	Terdapat Verbal MS (n-6)	Terdapat TMS (n-7)	MS (n-8)	TMS (n-9)
1	KAB. BOJONEGORO	21	4	17	0	0	4	17

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOJONEGORO

- 1. Ketua : PATISSEUR BOHMAN
- 2. Anggota : PATRIA LESTARI
- 3. Anggota : MUSTOFERIN
- 4. Anggota : MUCHAMMAD MUCHLISIN
- 5. Anggota : ROBBY ADI PERWIRA



4.8.18 BA HASIL VERFAK KESATU (SITI RAFIKA HARDHIANSARI)

MODEL BA VERFAK PENDUKUNG DPD-KPU KAB/KOTA



Jl. K. H. R. Moch. Rozyid No.93 Pacul Bojonegoro

BERITA ACARA
NOMOR 114/PL.01.1-BA/3522/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO

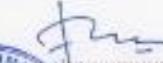
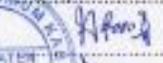
Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. BOJONEGORO, KPU KAB. BOJONEGORO telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama SITI RAFIKA HARDHIANSARI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KAB. BOJONEGORO

1. Ketua	: FATKHUR ROHMAN	
2. Anggota	: FATMA LESTARI	
3. Anggota	: MUSTOFIRIN	
4. Anggota	: MUCHAMAD MUCHLISIN	
5. Anggota	: ROBBY ADI PERWIRA	



LAMPIRAN MODEL BA VERPAK PENDUKUNG LINDUNG-KPU KAB/KOTA

**HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/REDUASI¹
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. BOJONEGORO**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : SETI RAHPIKA HARDEHANSARI

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4-5)	HASIL VERPAK		TANGGAPAN KEWARGASAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terdapat Verifik MS	Terdapat Verifik TMS	Jumlah (4-7)	MS (4-5)	TMS (4-5)
1	KAB. BOJONEGORO	132	25	127	0	0	0	25	127

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOJONEGORO**

- 1. Ketua : FATMELUR ROHMANN
- 2. Anggota : FATMA LISTARI
- 3. Anggota : MUSTOFIRIN
- 4. Anggota : MUHAMMAD MUCHLISIN
- 5. Anggota : ROHIBY ALDI PERMERA



